HIMPUNAN KETETAPAN

MUSYAWARAH NASIONAL V

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(L D I I)

JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

TEMA:

DENGAN MUNAS V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) 1998
KITA TINGKATKAN KUALITAS SDM
DALAM MENYIKAPI ERA GLOBALISASI

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan ucapan Alhamdulillahirobbil'alamin, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Nya serta atas izin-Nya MUNAS V LDII telah berhasil diselenggarakan dan menghasilkan keputusan dan ketetapan, yang merupakan refleksi pemikiran, komitmen dan konsistensi seluruh warga LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjelang terwujudnya Indonesia baru dan memasuki abad XXI.

Dari momentum waktu penyelenggaraan MUNAS V LDII dinilai sangat strategis karena diselenggarakan pada era reformasi, di mana bangsa Indonesia tengah mempersiapkan agenda bangsa untuk menapak jalan menuju suatu masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahuwata'ala, suatu wujud masyarakat Indonesia baru yang lebih elegan dan terhormat dalam lingkungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Tekad dan semangat reformasi yang mengalir di dalam jiwa peserta MUNAS V LDII telah mampu mendorong lahirnya paradigma baru untuk bersama-sama komponen bangsa yang lain membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, kesejahteraannya dan peranserta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Paradigma baru LDII tersurat pada **Catur Sukses** LDII yang secara substansial memuat pokok pikiran:

Pertama; Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya keorganisasian, sistematis dan sinergis yang diarahkan agar LDII secara sosiologis dapat tampil berperan lebih inklusif dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari kontribusi LDII kepada bangsa dan negara untuk mempercepat tercapainya Tujuan Nasional.

Kedua; Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka membentuk manusia sebagai insan dan sebagai sumber daya pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan normatif dan sumber motivasi pembentukan karakter yang prima, pembentukan akhlakul karimah, pembentukan pemikiran, wawasan dan penalaran yang luas dan dalam serta pemilikan sikap kemandirian yang kuat.

Keempat; Peningkatan peranserta sosial dan kemasyarakatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui upaya pemahaman dan penegakan hak dan kewajiban sebagai **warga negara yang baik**, serta **peningkatan budi pekerti yang luhur**, untuk turut serta mewujudkan **masyarakat madani** yang demokratis dan berkeadilan sosial dengan **mengembangkan sikap Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyah** dan **Basyariyah** serta **Ukhuwah Universal**.

Selanjutnya diharapkan kepada pengurus DPP LDII untuk mampu mengimplementasikan Catur Sukses dalam program nyata yang bermanfaat bagi warga LDII khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian juga kepada seluruh jajaran LDII DPD Tk. I, DPD Tk. II, PC, dan PAC serta seluruh warga LDII untuk bersama-sama dapat melaksanakan kebijakan dan program yang telah disepakati dalam Munas V LDII yang merupakan bagian dari amal sholeh kita.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberi perlindungan dan pertolongan serta hidayah-Nya kepada kita semua, Amiin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 25 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua Umum

- Lembar Judul .....
- Tema .....
- Pengantar dari Penyunting i
- Daftar Isi iii
- Sambutan Ketua Panitia Pelaksana MUNAS V LDII 1998 1
- Sambutan Ketua Umum DPP LDII 5
- Sambutan/Pengarahan Ketua Dewan Pembina 9
- Pidato Pengarahan Ketua Umum LPSI 15
- Pidato Pengarahan Ketua Umum DPP GOLKAR/Menteri Sekretaris Negara RI 19
- Keputusan DPP LDII Nomor: 113/KEP/DPP LDII/X/1998 Tentang Pimpinan Sidang 29
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 01/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Peraturan Tata Tertib 35
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 02/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Jadwal Acara 45
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 03/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII 49
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 04/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Program Umum LDII 75
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 05/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum LDII Masa Bakti 1990-1998 93
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 06/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP LDII Masa Bakti 1998-2003 105
- Keputusan MUNAS V LDII Nomor: 07/KEP/MUNAS V/LDII/1998 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan DPP LDII Masa Bakti 1998-2003 106
- Doa Penutup 116

h. Petunjuk Bagi Peserta 127

i. Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari MABES POLRI 129

d. Keputusan DPP LDII No. 01/KEP/DPP LDII/X/1998 Tentang Penanggung Jawab Pembidangan dan Pembinaan Departemen di Lingkungan DPP LDII 131

e. Daftar Nama dan Alamat Dewan Penasihat dan Pengurus Harian DPP LDII Masa Bakti 1998-2003 137

f. Daftar Nama dan Alamat DPD Tk. I Seluruh Indonesia 138

SAMBUTAN KETUA PANITIA MUNAS V LDII
TANGGAL 24 OKTOBER 1998
DI JAKARTA

Yang kami hormati

1. Dewan Pembina LDII
2. Rekan-rekan Pengurus DPP LDII
3. Para Undangan dan seluruh peserta dan peninjau MUNAS V LDII yang kami cintai.

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara MUNAS V LDII.

Tidak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sholallahu Alaihi Wasallam. yang telah memberikan bimbingan kepada umat-Nya sehingga kita sekalian sebagai muslimin dan muslimat senantiasa dalam karunia-Nya dan menikmati manisnya iman dan taqwa kepada-Nya.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara sekalian, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan MUNAS V LDII 1998.

Pertama: Sebagaimana Bapak, Ibu, Saudara maklumi bahwa penyelenggaraan MUNAS V LDII tahun 1998 ini tenggang waktu kurang lebih delapan tahun dengan penyelenggaraan MUBES IV LEMKARI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s/d 20 Nopember tahun 1990 yang lalu. Padahal sesuai pasal 17 AD LDII periode kepengurusan berlaku selama lima tahun, artinya setidaknya paling lambat pada akhir tahun 1995 MUNAS V LDII seharusnya telah diselenggarakan. Namun karena adanya hambatan dan kendala terutama berkaitan dengan pendanaan bagi penyelenggaraan MUNAS V LDII dengan sangat terpaksa ditunda dan Alhamdulillah MUNAS V LDII dapat diselenggarakan pada hari ini yang sebentar lagi akan dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya.

Guna melegitimasi kepengurusan DPP LDII sampai menjelang MUNAS V LDII 1998 ini melalui RAKERNAS LDII tahun 1996 DPD Tk. I LDII seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 26 Provinsi telah menyampaikan rekomendasinya kepada DPP LDII untuk:

b. Menetapkan pengisian lowongan kepengurusan antar waktu sampai terselenggaranya MUNAS V LDII.

Dengan demikian DPP LDII memiliki legitimasi dan landasan yuridis untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sampai terselenggaranya MUNAS V LDII.

Kedua: Penyelenggaraan MUNAS V LDII tahun 1998 ini memiliki nilai yang sangat strategis, hal ini mengingat:

a. Bahwa MUNAS V LDII merupakan MUNAS LDII terakhir abad ke-20 untuk memasuki abad millenium ketiga yang penuh dengan ketidak-pastian.

b. Bahwa MUNAS V LDII adalah pada saat kita tengah berusaha lolos dari krisis ekonomi dan krisis moneter.

c. Bahwa MUNAS V LDII diselenggarakan pada era reformasi, dimana ada keinginan yang sangat kuat dari seluruh komponen bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap tatanan kehidupan politik, ekonomi dan hukum serta upaya menerapkan secara serius tatanan kehidupan demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan masalah universal lainnya.

Nilai strategis penyelenggaraan MUNAS kali ini akan sangat kental mewarnai seluruh aspek penyelenggaraan MUNAS V LDII ini, dari mulai penyiapan materi dan rancangan ketetapan MUNAS sampai semangat pelaksanaan MUNAS V LDII ini, kami berharap semoga semangat reformasi juga mengalir kepada seluruh peserta MUNAS V LDII sehingga mampu melahirkan produk-produk yang reformis.

Ketiga: Sisi pelaksanaan MUNAS V LDII yang juga ingin kami laporkan adalah meliputi:

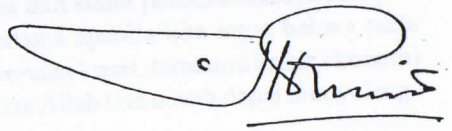
a. Untuk petama kalinya MUNAS LDII diikuti oleh 27 perwakilan DPD Tk. I LDII seluruh Indonesia, dengan menghadirkan adik bungsu Timor-Timur yang masa bakti kepengurusannya belum genap satu tahun. Selamat datang adik bungsu kami semoga anda dapat cepat beradaptasi dengan kakak-kakak anda.

b. Jumlah peserta MUNAS V LDII ini sebanyak 500 orang yang terdiri dari 40 orang dari DPD Tk. I LDII dan 260 orang DPD Tk. II, 50 orang Wanbin dan pengurus DPP LDII, 150 orang peninjau.

nya akan dilangsungkan secara tertib sesuai jadwal acara, yang Insya Allah akan berakhir pada pukul 22.00 WIB.

Demikian laporan kami, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara seluruh jajaran pengurus LDII serta semua pihak yang telah berkenan membantu terselenggaranya MUNAS V LDII, kami ucapkan banyak terima kasih. Seandainya dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya kami selaku panitia pelaksana MUNAS V LDII dan seluruh anggota panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya.

PANITIA PELAKSANA
MUNAS V LDII - 1998
Ketua,



K.H. Dawud Sri Nur Hidayat

SAMBUTAN KETUA UMUM DPP LDII
PADA MUNAS V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TANGGAL 24 OKTOBER 1998
DI JAKARTA

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Para hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillahi Robbil Alamin, kita panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua yang tidak dapat kita hitung besarnya, termasuk pada saat ini, yaitu saat kita melakukan MUNAS V LDII ini.

Rasanya tidak berlebihan apabila kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah terutama bahwa kita insya Allah dapat melaksanakan MUNAS ini dengan sebaik-baiknya. Baik dari sudut pelaksanaannya maupun dalam kualitas keputusannya nanti. Terutama apabila kita ingat bahwa pada saat ini negara kita praktis masih dalam kondisi krisis, terutama krisis ekonomi dengan berbagai dampaknya. Dengan seizin Allah kita masih dapat menyelenggarakan MUNAS ini.

Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang kepada para peserta MUNAS, dan juga terima kasih kepada saudara sekalian, karena dengan kehadiran saudara semua ini dengan jumlah 27 DPD Tk. I dan 260 DPD Tk. II LDII dan 50 orang pengurus lama, maka MUNAS dapat terselenggara karena telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya kami harapkan pula agar saudara-saudara peserta MUNAS yang telah memperoleh mandat dari daerahnya masing-masing, nantinya dapat bermusyawarah dengan sebaik-baiknya sesuai ciri-ciri Lembaga Dakwah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sangat berkualitas yang memenuhi harapan warga LDII. Dengan demikian pada saat kembali dapat menyampaikan hasil MUNAS ini sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh daerahnya masing-masing.

Saudara sekalian yang kami hormati,

Mengapa kualitas keputusan MUNAS kami anggap penting?

Beberapa hal akan kami sampaikan berikut ini. Ada beberapa kata kunci yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan eksistensi ormas secara umum di masa mendatang dan secara khusus organisasi LDII ini.

Masuknya kita semua pada millenium ketiga atau pada tahun 2000 yang akan datang akan menimbulkan berbagai implikasi, yang barang kali kita tidak pernah duga sebelumnya, beberapa ciri-cirinya telah kami sampaikan pada Rakernas-Rakernas sebelum MUNAS. Sedangkan beberapa hal yang perlu kita antisipasi adalah terasa akan adanya bentuk-bentuk keseimbangan baru di mana komponen atau unsur-unsur pembentuk keseimbangan baik pada tingkat global, regional maupun lokal, belum tentu adalah unsur-unsur pembentuk keseimbangan, yang ada pada masa sekarang ini, terlebih masa yang lalu.

Misalnya munculnya kekuatan yang sangat menentukan dari para Fund Manager yang terbukti dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang internasional yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Ini termasuk fenomena baru yang belum pernah kita kenal pada masa lalu. Kemudian munculnya pendapat-pendapat pada berbagai hal oleh publik figur, baik tingkat global, regional dan lokal, dapat pula berpengaruh pada berbagai bentuk-bentuk keseimbangan tatanan masyarakat dalam berbagai tingkatan.

Dalam menyikapi kondisi seperti itu, kita harapkan dari MUNAS ini nantinya, dalam menyongsong berbagai bentuk kemungkinan keseimbangan baru nanti, dapat digali lebih dalam, bagaimana secara umum suatu ormas dapat berfungsi bagi upaya meningkatkan kemandiriannya, yang di satu segi kemandirian dapat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan, yaitu bahwa suatu ormas telah dapat mengakumulasikan potensi anggotanya beserta potensi lainnya menjadi suatu potensi produktif nyata yang membawa manfaat bagi dirinya maupun bagi bangsanya. Di segi lain menunjukkan adanya kesatuan antara para pengurus di semua lini dengan para anggotanya.

Hal lain yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan era millenium ketiga di atas adalah perlunya suatu ormas untuk dapat memberdayakan anggotanya, agar secara langsung maupun tidak langsung suatu ormas dapat memberikan iklim bagi para anggotanya untuk dapat lebih berdaya dalam upaya mengatasi persoalan sehari-hari.

Sedangkan secara khusus Lembaga Dakwah kita mengantisipasi bahwa nilai-nilai moral di masa mendatang akan menduduki posisi yang sangat kuat dalam mendasari berbagai pertimbangan atau keputusan dalam memberikan penilaian terhadap baik buruknya berbagai hal dalam berbagai segi kehidupan, baik penilaian individual maupun dalam penilaian kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu suatu ormas dengan aktivitas dakwah harus mampu untuk

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang, dalam aktualisasi serta penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan.

Itulah tiga kata kunci yang ingin kami wariskan kepada pengurus terpilih nantinya, yaitu kemandirian, pemberdayaan, dan commited pada nilai-nilai moral.

Demikian secara singkat apa yang kami harapkan di masa mendatang berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan kami ini agar generasi yang lebih muda dari kami dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi sehubungan dengan harapan yang telah kami paparkan di depan. Dan sekaligus pada ksesempatan ini kami menyatakan di sini bahwa lapangan amal sholih kami sebagai ketua umum DPP LDII kiranya telah selesai dan kami berpikir untuk lebih menekuni lapangan amal sholih dalam bentuk yang lain, ...tentu saudara sekalian mengerti apa yang kami maksud dengan ini, dalam bahasa dakwah, yang dalam bahasa organisasi artinya" ya kami tidak bersedia untuk dipilih kembali menjadi ketua umum".

Sekaligus dalam kesempatan ini, kami sampaikan pula ucapan terima kasih pada segenap anggota pengurus DPP LDII periode yang lalu yang dengan sungguh-sungguh telah meluangkan waktunya untuk melancarkan roda organisasi dengan tanpa pamrih, untuk itu semua kiranya Allah jualah yang akan memberikan ganjaran di sisi-Nya nanti.

Selamat melaksanakan MUNAS .....
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Hartono

K.H. Hartono Slamet
Ketua Umum

SAMBUTAN PENGARAHAN
PADA MUNAS V LDII 1998
DI JAKARTA

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi Robbil alamin, Asyhadu anlaa Illaahaillallahu, Waasyhadu anna Muhammadarrosulullah Solallahu Alaihi Wasallam Waala alihi Waashabihi Amma ba'du.

Maaf para hadirin, kami merasa, bahwa kami sebagai Dewan Pembina paling banyak kekurangannya di dalam membina organisasi, karena kami ingat pada tempat ini delapan tahun yang lalu dalam situasi yang hampir sama, kami juga menyatakan untuk tidak bersedia dipilih menjadi ketua umum lagi, kemudian delapan tahun kemudian, saudara kami yang sangat dipercaya, juga menyatakan hal yang sama.

Jadi kalau dalam pengarahan ini barang kali kami lebih banyak berbicara tentang LDII delapan tahun yang lalu, kemudian situasinya sekarang sama, kami mohon maaf, kami berusaha untuk bertahan untuk tidak terbawa arus emosi, tetapi karena kami juga manusia seperti bapak-bapak dan saudara, nampaknya kami tidak cukup teguh dalam menerima apa yang diucapkan oleh saudara Hartono Slamet sebagai Ketua Umum, untuk itu kami mohon maaf. Mudah-mudahan kami tetap tegar untuk memberikan arahan ini.

Pertama-tama yang terhormat Bapak Alim Ulama yang berdiri dan yang duduk di sebelah kanan para hadirin, kemudian para peserta MUNAS, baik dari unsur Dewan Pembina, unsur DPP, DPD Tk. I, dan DPD Tk. II. Kemudian tanpa mengurangi hormat kami kepada Lembaga Pembina Politik Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini telah mengutus utusan yang dalam hal ini juga kami mohon maaf, karena jauh dari sebelum MUNAS ini kita laksanakan tatakrama organisasi sudah kita laksanakan dengan "memohon agar Departemen Dalam Negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1985 sebagai Pembina Politik memberikan pembinaan namun sampai saat-saat terakhir, beliau karena kesibukannya tidak dapat hadir untuk memberikan arahan. Kepada bapak petugas yang ditugasi oleh Departemen Dalam Negeri dalam kesempatan ini tolong disampaikan kepada Bapak Menteri - Bapak Syarwan Hamid yang sudah tidak asing lagi tentang LDII, salam hangat dari peserta Munas LDII".

Kalau Era tidak tema, bahwa kita dalam menuju milenium yang penghabisan lagi akan berakhir menjelang tahun 2000, tema ini bertitik tolak kepada kualitas SDM dalam menyikapi Era Globalisasi.

Dari dua pertiga jumlah Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif di Indonesia yang jumlahnya 308 sudah dapat disusun komposisi yang personalnya lebih dari dua pertiga, kok seandainya kita mau bikin partai, umpamanya, itu sudah ada pendukung-pendukung masa di tempat-tempat di mana ada daerah-daerah Kabupaten. Tetapi kembali lagi kepada masalah pokok, kepada masalah sejak awal mulanya berdirinya LDII, tidak pernah mimpi apalagi mau membuat partai saudara-saudara sekalian. Bahwa LDII adalah merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang Dakwah keagamaan, menampung aspirasi untuk orang beramal sholih.

Nah ini menunjukkan adanya kemajuan, walaupun lambat tapi pasti, bahwa konsolidasi organisasi ini dari mulai DPP sampai Anak Cabang sudah berjalan baik. Kalau kita bicara soal jumlah, itulah kenyataan, dan kalau kita bicara soal kualitas seperti apa yang telah diucapkan oleh Ketua Umum tadi bahwa dengan munculnya generasi muda yang mempunyai kualitas yang mempunyai bobot pengetahuan. Kami ingat betul pada tahun 1973 ketika kami ditunjuk pertama kali menjadi pimpinan LDII di Jakarta, jumlah sarjana yang menjadi pimpinan LDII di Jakarta tidak lebih dari lima orang, tapi Alhamdulillah sekarang ini jangankan yang akan menjadi pengurus, warga LDII di mana-mana tempat, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, hampir setiap tritisan rumah "itu ada sarjananya setidak-tidaknya sardjono". Saudara-saudara sekalian, ini dikemukakan oleh saudara Ketua Umum.

Konsolidasi organisasi yang sekarang sudah 27 Provinsi lambat namun pasti, LDII telah melaksanakan, ini harus terus dikembangkan jangan mandeg, mandegnya kalau saudara sudah tidak punya nafas lagi, oleh karena itu pernyataan saudara Ketua Umum, pernyataan saudara Hartono Slamet, sebagai pejuang tidak paripurna dalam berjuang. Saudara-saudara pengurus DPP yang lama yang nanti akan segera diganti oleh pengurus yang baru tidak ada istilah paripurna dalam berjuang.

Perjuangan berjalan terus, berikan apa yang ada pada dirimu untuk memperbanyak amal sholeh di dalam berjuang!

Jadi konsolidasi organisasi ini yang sudah kita amati sejak berdirinya LDII sampai sekarang ini terus berkembang dan Alhamdulillah sudah mencapai 27 propinsi, kita syukuri Alhamdulillahi Robbil alamin.

Kemudian yang kedua saudara sekalian, pesan kami kepada saudara tadi sudah disinggung, kita punya tema dalam menyikapi era globalisasi tanpa adanya wawasan dari pimpinan organisasi, maka kita akan tenggelam, akan digilas dengan perubahan zaman yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Oleh karena itu kami mengharapkan hendaknya pimpinan-pimpinan yang baru nanti (saya tidak tahu siapa nanti yang akan dijadikan pemimpin), tanggung jawab saudara adalah lebih berat dari pada tanggung jawab kami pada tahun 1973.

Kepada peserta dan juga kami titip kepada saudara pengurus terpilih nanti untuk melaksanakan terus menerus konsolidasi organisasi, untuk melaksanakan terus-menerus konsolidasi wawasan, dan terus menerus melaksanakan konsolidasi asas sehingga Alhamdulillah kalau kita melihat bahwa LDII ini kompak, karena kita terus menerus melaksanakan konsilidasi organisasi, konsolidasi wawasan dan konsolidasi asas.

Semoga Saudara-saudara dapat melaksanakan MUNAS ini dengan baik dan kemudian dapat menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan MUNAS.

Semoga Allah meridhoi kita sekalian

Demikian hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 24 Oktober 1998

DEWAN PEMBINA LDII

Drs. H. Ahmad Suarno, MBA.

PIDATO PENUTUPAN MUNAS V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
YANG MENGAMBIL TEMA:

DENGAN MUNAS V LDII 1998
KITA TINGKATKAN KUALITAS SDM
DALAM MENYIKAPI ERA GLOBALISASI

Oleh: H. Rudini, Ketua Umum LPSI

Munas V LDII, 24 Oktober 1998

PIDATO PENERIMAAN MUNAS V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA YANG MENGAMBIL TEMA: DENGAN MUNAS V LDII 1998 KITA TINGKATKAN KUALITAS SDM DALAM MENYIKAPI ERA GLOBALISASI

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat LDII yang telah mengundang saya untuk menutup bersama MUNAS ini. Sungguh-sungguh suatu kehormatan yang tak terhingga bagi saya, mengingat MUNAS yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Pusat, DPD Tk. I dan Tk. II LDII saya nilai sangat penting.

Pentingnya seminar ini, ditandai oleh tema yang mengemukakan tentang perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menyikapi Era Globalisasi.

Berbicara tentang kualitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi era persaingan antara bangsa, bukan saja keterampilan ilmu dan teknologi, tapi lebih dari itu adalah meningkatkan kualitas mental dan moral bangsa Indonesia, melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terperosoknya bangsa ini ke dalam krisis sekarang ini adalah karena masalah mental dan moral ini, yang sudah mengabaikan rasa malu dan berbuat dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga lahirlah istilah KKN.

Saya kira LDII, sebagai lembaga kehormatan (Dakwah), merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengingatkan bangsa ini, bahwa kita perlu kembali ke jalan Allah SWT, agar bisa segera kembali pulih dari keterpurukan sekarang ini.

Terlebih-lebih dalam era reformasi yang sedang kita jalani bersama ini, LDII melalui dakwah-dakwahnya dapat ikut meluruskan kembali jalannya reformasi yang menurut saya sudah semakin menyimpang dari gagasannya.

Berbeda dengan revolusi yang kata Bung Karno: Menjebol dan membangun, reformasi adalah perbaikan, penyempurnaan dan kalau perlu pembaharuan dari tatanan kehidupan yang ada, karena sudah rusak, obsolut (usang), atau sudah tidak relevan dan sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman. Berbagai kerusakan tatanan kehidupan kita akibat format kehidupan orde baru, meliputi bidang politik yang menjadi otoriter, bidang ekonomi yang berorientasi ke konglomerasi, bidang hukum di mana keadilan tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan HAM yang sudah tidak dihormati. Namun di atas semua itu, kerusakan yang paling parah, seperti saya singgung pada awal makalah, adalah mental dan moral, karena lunturnya iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Maka harapan saya kepada LDII, LDII harus proaktif ikut mengarahkan sasaran reformasi kepada bidang-bidang yang mengalami kerusakan tersebut.

Karena reformasi bukan revolusi, juga kita ingatkan masyarakat bahwa reformasi tidak boleh dilaksanakan secara radikal, dan tetap mengikuti norma-norma dan kaidah yang berlaku. Reformasi tetap mengikuti semua tatanan yang ada, oleh karena itu reformasi seharusnya tetap berpijak kepada tatanan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang ada.

Dari hari ke hari, sepertinya perilaku Orde Baru yang ditentang itu, justru dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Reformasi. Seperti di bidang politik, terjadi pemaksaan kehendak terhadap orang lain, teror dan intimidasi, penghujatan, fitnah dan merasa benar sendiri. Kedaulatan rakyat nyaris menjadi anarki, manakala kedaulatan rakyat diartikan dengan rakyat berhak berbuat apa saja sesuai kemauannya. Sudah lupa bahwa demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan melalui Pemilu, bukan melalui unjuk rasa.

Juga kita melihat bahwa dalam menyampaikan aspirasinya, banyak pengunjuk-rasa yang kurang menghargai hak asasi orang lain, atau hak asasi kelompok masyarakat lainnya. Harus selalu diingat bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat majemuk, dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama dan bahasa. Bila masalah asasi orang lain diabaikan, kapan kita memperjuangkan HAM Universal.

Di bidang ekonomi, walaupun orientasinya sudah diarahkan ke ekonomi rakyat, namun belum ada perubahan nyata yang dapat membawa rakyat ke arah perbaikan kehidupan. Di bidang ini masih terjadi kontroversi, salah satu sebabnya adalah penyakit lama KKN, masih belum dikikis, karena pemerintahpun tidak terlalu antusias menangani masalah KKN itu.

Di bidang hukum juga masih terjadi ketidak-pastian dan diskriminasi. Hukum masih belum berpihak kepada rakyat kecil, masih tetap seperti sedia kala di mana hukum dan keadilan masih milik penguasa dan pemilik uang. Khusus anggota masyarakat yang mengadukan pejabat KKN, namun bukanya pejabat yang disidik, tetapi pengadu, menambah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah untuk memelopori reformasi.

Keadaan yang kurang menyenangkan seperti diulas di atas, menjadikan optimisme berubah menjadi pesimisme. Bila keadaan ini tidak segera dibetulkan disintegrasi yang sangat dikhawatirkan bangsa ini, bisa saja terjadi.

Untuk itu, perlu diadakan konsensus nasional baru yang harus dilakukan segera, merumuskan kembali tentang makna reformasi dan tujuan yang ingin dicapai, yang tidak lain untuk membangun kembali kebesaran bangsa dan negara menentukan rambu-rambu reformasi agar penyampaian aspirasi bisa lebih teratur, tanpa mengurangi kebebasan masyrakat dalam berekspresi dan berpendapat, yang baru pulih setelah dipasung orba.

Saudara-saudara sekalian,

Banyak negara lain sudah lama melakukan gerakan reformasi, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan, Penyebab kegagalan antara lain karena kesalahan apresiasi terhadap reformasi itu sendiri. banyak kalangan masyarakat bahwa para pemimpin, menginginkan hasil yang cepat, agar popularitasnya menaik. Lain keinginan lain pula kenyataan. bukan hasil yang baik yang diperoleh, tetapi kehancuran kehidupan (politik dan ekonomi) yang datang dengan cepat, yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa dan negara seperti dialami negara-negara Eropa Timur.

Untuk ke depan tindakan-tindakan kita harus rasional. Proses reformasi tidak boleh radikal, harus dilaksanakan dengan pijakan konstitusi yang ada, dan menghormati hukum yang berlaku. Reformasi juga harus didasarkan konsep yang jelas (konseptual), terencana, terkoordinir dan simultan. Memang kita harus yakin, bahwa reformasi pasti mendatangkan kemajuan, namun tidak secepat membalik telapak tangan, tapi bertahap, sesuai sasaran yang ditetapkan. dengan kata lain, masyarakat perlu diberi informasi yang benar, bahwa reformasi memerlukan waktu yang panjang sebelum membahagiakan masyarakat.

Kesimpulannya, untuk memenangkan era persaingan antar bangsa dalam era yang disebut era globalisasi, perlu kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih kokoh, yang terampil baik di bidang iptek maupun kuat mental serta moralnya. Dan itu bisa terjadi bila kita dapat meluruskan kembali jalannya reformasi

bukan sebaliknya.

Sebagai penutup, saya ingin mengajak MUNAS V LDII, memikirkan masalah ini, masalah yang menyangkut kelangsungan hidup negara kesatuan RI tercinta ini.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Oktober 1998

KETUA UMUM LPSI

H. Rudini

PIDATO PENGARAHAN KETUA UMUM DPP GOLKAR PADA MUNAS V LDII 1998 DI JAKARTA

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

- Yang terhormat saudara-saudara para Pembina LDII
- Saudara-saudara para pengurus dan saudara-saudara para peserta Musyawarah Nasional LDII
- Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh Subhanahu Wata'ala. Atas perkenan-Nya, atas taufik dan hidayah-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturohim dalam keadaan sehat wal afiat.

Pada kesempatan siang hari ini saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, bersama-sama rekan saya saudara Irsyad Sudiro merasa mendapat suatu kehormatan dan juga sangat berbahagia dapat hadir di tengah-tengah keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Pada hari ini saya sebetulnya akan keluar kota, kemudian ada undangan dari LDII. Karena saya sudah mengenal LDII begitu lama, sejak pertama kali aktif di Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu tahun 1977. Saya sudah kenal dengan LDII, maka walaupun saya harus keluar kota, saya mengatur supaya dapat hadir dalam MUNAS LDII ini. Kalau saya tidak hadir dalam MUNAS LDII ini, saya takut kualat. Karena itu saya mengatur jadwal penerbangan saya. Saya berangkat sore ini, ada acara keluarga ke Jawa Tengah / ke Solo tempat istri saya. Saya tanya, apakah saya dimungkinkan datang siang hari ? Alhamdulillah ternyata peserta MUNAS menyediakan waktu walaupun sedikit banyak akan terganggu acara-acara MUNAS ini.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Kita sekarang melakukan MUNAS LDII dalam suasana memasuki era baru dalam kehidupan bangsa, kehidupan negara kita, kehidupan masyarakat kita, yaitu era reformasi. Era Reformasi ini adalah suatu era di mana masyarakat kita telah meningkatkan aspirasi harapan, dan tuntutan-tuntutannya. Dan tuntutan-tuntutan dari masyarakat tersebut diperjuangkan oleh generasi muda kita. Hal yang sama juga telah menginspirasikan organisasi Golongan Karya sehingga Golongan Karya pun kemudian melakukan pula Reformasi, atau antara lain reformasi yang kita lakukan yaitu mengadakan MUNAS Luar Biasa beberapa waktu yang lalu.

pun tuntutan tuntutan Reformasi dari masyarakat, untuk kita ketahui bahwa tuntutan reformasi masyarakat kita itu tidak lain adalah untuk dapat memperbaiki mengorekai kekurangan dan kekeliruan kita pada masa lalu dan kemudian membangun suatu tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan agama dalam suatu semangat yang baru, semangat reformasi, baik itu di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang hukum serta di bidang-bidang lainnya.

Secara khusus saya ingin menyinggung tentang bidang politik. Dalam era reformasi ini diwujudkan dalam bentuk terciptanya suatu iklan politik yang semakin terbuka, demokrasi yang memungkinkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya itu secara langsung.

Kalau kita lihat dari jati diri Golkar, Golkar itu juga adalah pembantu, oleh karena itu Golkar juga menyambut baik langkah- langkah Reformasi, bahkan Golkar juga ikut serta mempelopori reformasi itu, baik di bidang politik, di bidang hukum, di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lain dan hal itu telah kita wujudkan di dalam persidangan di badan pekerja MPR yang sedang menyiapkan materi-materi untuk Sidang Istimewa yang akan datang, oleh karena itu Golkar juga memperjuangkan, misalnya yaitu kita ingin mencabut Ketetapan MPR tentang pemberian tugas dan kewenangan khusus kepada Presiden. Karena itu kita beranggapan bahwa tugas dan wewenang khusus itu terlalu berlebihan memberikan kekuasaan kepada Presiden, kita juga membatasi masa jabatan Presiden, hanya sampai 2 X maksimum. Karena, apabila terlalu lama, mengakibatkan Presiden bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian kita juga akan mencabut Tap tentang Referendum, kita juga akan mencabut dan mengganti Tap II/78 tentang P4, kita juga mempersiapkan Rantap tentang hak-hak asasi manusia, memperjuangkan Rantap tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, memperjuangkan rantap tentang pemberian otonomi daerah, pembagian keuangan pusat dan daerah dan berbagai ketetapan- ketetapan lainnya kita perjuangkan, itulah respon kita terhadap Reformasi.

Sekarang bagaimana memasyarakatkan reformasi kita kedalam? Ini juga penting untuk dilakukan oleh saudara-saudara. Dalam reformasi kita kedalam, maka kita membangun suatu citra baru dengan visinya yang baru, dengan misinya yang baru yang sekaligus membedakan Golkar yang sekarang dengan Golkar yang lama. Kita membuat suatu disconnection suatu garis pemutus antara Golkar yang lama dengan Golkar yang baru itulah yang sekarang kita bangun. Nah, apa yang kita artikan dengan Golkar yang baru itu ? yaitu Golkar

sekaligus akan membedakan Golkar yang sekarang ini dengan Golkar yang lama, apa itu ? Nah, untuk menyebut beberapa, dapat saya sampaikan, waktu kita memang tidak panjang, yaitu ingin membangun Golkar ini menjadi suatu Organisasi politik yang betul-betul mandiri.

Kesatu : Golkar yang mandiri. Kenapa kita membutuhkan Golkar yang mandiri ? Karena kita ketahui bahwa iklim politik kita kedepan mengharuskan Golkar itu betul-betul bisa menjadikan kekuatan yang mandiri, apalagi Golkar kedepan sudah siap untuk menjadi partai politik. Maka dengan demikian kemandirian Golkar semakin dibutuhkan. Kemandirian Golkar itu artinya apa ? Artinya adalah setiap keputusan, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Golkar adalah putusan, langkah dan kebijakan yang ditetapkan atas kekuatan Golkar sendiri, bukan karena pengaruh atau kekuatan-kekuatan dari luar Golkar.

Nah, karena itu struktur organiasi yang membuat Golkar tidak mandiri kita perbaiki, kita koreksi, seperti, antara lain Dewan Pembina. Dewan Pembina adalah suatu Dewan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi bahkan bisa sampai meniadakan putusan-putusan organisasi / putusan DPP, bahkan bisa membekukan DPP bila mana DPP dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dilihat dari perspektif pembina. Dewan Pembina itu suatu lembaga, tetapi kenyataannya kekuasaan Dewan Pembina itu bukan dari lembaganya, tapi diatas tangan ketua Dewan Pembina. Pada perspektif sistem yang lama adalah Presiden, akibatnya ketergantungan Golkar terhadap pembina dan Dewan Pembina, tidak dapat dihindari karena strukturnya demikian itu. Tidak saja ketergantungan dari segi pembiayaan/dana, karena dana itu dikuasai juga oleh ketua Dewan Pembina. Nah, struktur itulah yang kemudian kita hilangkan sehingga sekarang ini kita tidak mengenal lagi struktur Dewan pembina, yang ada adalah Dewan Penasihat.

Lembaga Penasihat itu adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang, tokoh-tokoh yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang arif dan bijaksana, dimana sifat-sifat arif dan bijaksana yang mereka miliki dapat merupakan suatu masukan-masukan kepada organisasi, tetapi institusi yang memutuskan terakhir setiap langkah itu adalah tetap organisasi, tanpa ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi.

Kemudian kedua, juga struktur yang selama ini kita kenal seperti jalur-jalur dalam organisasi Golkar, ada jalur A, jalur B, jalur G. Dengan jalur-jalur yang terstruktur inipun Golkar tidak bisa mandiri secara penuh. Karena apa ? karena apabila Golkar akan mengambil langkah-langkah, mengambil keputusan-

Kepalisan terlebih dulu harus diselesaikan mengingat ada tiga jalur. Akibatnya Golkar tidak juga bisa mandiri. Karena itu struktur tiga jalur yang membuat Golkar tidak mandiri itu pun kita hilangkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kekuatan-kekuatan yang menjadi pendukung dari pada tiga jalur itu kita tetap membina/menjalin hubungan. Itulah yang kita artikan Golkar yang mandiri. Dengan demikian sekarang ini keputusan dilakukan oleh Golkar sendiri tanpa ada pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang lain.

Setidak-tidaknya itulah yang secara formal kita bangun, dan kita mencoba kemandirian itu betul-betul kita laksanakan. Tidak saja dalam pengertian yang formal, tetapi dalam kenyataan kita akan mewujudkan Golkar yang mandiri itu.

Kemudian kita ingin membangun Golkar yang demokratis. Golkar yang demokratis itu artinya adalah kita ingin membangun iklim demokrasi tidak saja keluar tetapi juga kedalam Golkar.

Iklim demokrasi itu artinya apa ? Demokrasi itu artinya kedaulatan ada di tangan anggota. Kalau dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kedaulatan itu ada ditangan rakyat. Kita berikan kepada setiap kader Golkar secara terbuka untuk bisa menjadi pimpinan dan kemudian dalam pemilihan kepemimpinan itu kita juga melakukan pemilihan dengan melakukan pemungutan suara secara langsung, bilamana tidak bisa secara musyawarah. Dan itu telah kita praktekkan pada waktu MUNAS Luar Biasa yang lalu. Kepada DPD-DPD Tk. I diberikan kesempatan untuk mencalonkan secara terbuka calon-calon Ketua Umum, kemudian setelah itu diberi kesempatan pula untuk memilih secara langsung, bebas dan rahasia. Pada MUNASLUB yang lalu itu kita melihat ada 2 calon/kandidat, saya sendiri dan Pak Edi kemudian diselesaikan dengan pemungutan suara. Nah, inilah yang akan kita coba kembangkan dalam internal organisasi Golkar. Sekarang dalam musyawarah Golkarpun sudah kita lakukan, Rekrutmen kepemimpinannya itu secara terbuka, secara langsung dimana kedaulatan itu betul-betul ditangan anggota (itu yang kedua).

Kemudian yang ketiga, kita juga ingin membangun Golkar yang betul-betul mengakar di tengah-tengah rakyat. Karena itu memahami bahwa perjuangan Golkar itu haruslah perjuangan yang mencerminkan, menyalurkan aspirasi rakyat dan kita memahami kekuatan-kekuatan Golkar itu ada dimana kekuatan berada di tangan rakyat. Lebih dari itu bahwa rakyat adalah sumber legitimasi dari pada kepemimpinan Golkar. Oleh karena itu kita harus mengakar di tengah-tengah rakyat dan untuk itu maka Golkar haruslah responsif terhadap

tanggap, karena rakyatlah yang menjadi sumber kekuatan Golkar, sumber legitimasi Golkar. Agar Golkar itu betul-betul dipercayai oleh rakyat diaspirasi oleh rakyat, maka Golkar harus tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, bahkan tidak hanya tanggap, Golkar juga harus proaktif. Oleh karena itu Golkar juga harus responsif terhadap aspirasi-aspirasi dan kepentingan rakyat. Hanya dengan cara itulah Golkar akan tetap mendapat kepercayaan dari rakyat. Pada masa lalu karena ada kekuatan/jalur-jalur lain yang menjadi pendukung kita, maka Golkar mencapai kemenangan seperti sekarang ini, terutama kita mengenal adanya jalur-jalur. Jalur-jalur ini yang juga menjadi kekuatan yang menopang Golkar sehingga Golkar mencapai kemenangan seperti sekarang ini. Ketetapan kita tidak lagi mengenai jalur-jalur itu, karena itu bila mana kita ingin tetap mendapat kepercayaan atau menang, maka kita harus memanfaatkan, mengoptimalkan jalur yang kita miliki sendiri, bukan jalur-jalur yang lain. Nah, disini arti pentingnya kita mengkonsolidasikan organisasi Golkar supaya Golkar tetap kuat.

Yang keempat adalah kita ingin menjadi Golkar tetap sosial, Golkar yang kokoh, Golkar yang kuat. Dimana Golkar yang sosial itu adalah Golkar yang didukung oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan pendukung Golkar itu bisa kita padukan sehingga bisa menciptakan suatu sinergi-sinergi positif bagi kepentingan dan bagi dukungannya kepada Golkar. Untuk menciptakan organisasi yang solid dan yang kokoh, untuk itulah, maka Golkar melakukan konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan tidak saja secara vertikal dari pusat ke bawah, dimana kita mengkonsolidasikan kelembagaan-kelembagaan Golkar tingkat pusat, tingkat I, tingkat II bahkan sekarang secara horizontal. Yang kita artikan konsolidasi secara horizontal adalah kita mengkonsolidasikan seluruh kekuatan organisasi yang menjadi pendukung Golkar, sehingga mampu menciptakan suatu sinergi-sinergi yang positif.

Nah, kekuatan pendukung Golkar itu apa ? yaitu kekuatan yang menjadi pendukung kita yang kita kenal sebagai Orsosmasinal, kita bisa tiga pendekatan. Pertama : Orsosmasinal yang memang sejak lahirnya Golkar telah turut bersama-sama dengan Golkar, bahkan diantaranya termasuk pendirinya Golkar, misalnya KOSGORO, MKGR, SOKSI, GAKARI. Kedua : juga ada Orsosmasinal yang didirikan oleh Golkar dalam rangka untuk memperkuat basis-basis pendukung Golkar dimasyarakat sesuai dengan kolmpok-kelompok strategis yang ada di masyarakat. Misalnya AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), HWK (Himpunan Wanita Karya), Al Hidayah, MDI, itu memang

upaya pembinaan dan pengembangan dengan kelompok-kelompok strategis yang ada di masyarakat, seperti kelompok pemuda, kelompok wanita maupun kelompok ulama.

Kemudian yang ketiga adalah kekuatan organisasi Sosial Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasinya kepada Golkar. Nah, seperti antara lain : LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) ini. Beberapa waktu yang lalu juga Math'laul Anwar, mereka telah menyatakan sikapnya tetap menyalurkan aspirasinya kepada Golkar, kemudian sebelumnya juga persatuan Tarbiyah Islamiah mereka menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Golkar.

Nah, inilah yang kita artikan bahwa konsolidasi ini menjadi suatu kekuatan yang bersifat sinergi yang positif. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Presiden kita Pak Habibie, bahwa sinergi positif itu adalah organisasi yang berinteraksi satu sama lain maka resultan dari interaksi itu menghasilkan suatu kekuatan yang besar, kira-kira itulah. Jadi interaksi kita artinya kita mempunyai kepentingan yang sama, dengan demikian dalam prospektif Golkar dengan LDII itu artinya adalah bahwa bukan hanya LDII saja yang berkepentingan kepada Golkar, tapi Golkarpun berkepentingan terhadap LDII, oleh karena itu kita bisa menciptakan adanya suatu simbiose mutualisme, yaitu sesuatu yang menguntungkan bersama-sama. Golkar berinteraksi dengan LDII akan menguntungkan Golkar dan dilain pihak pun LDII juga mendapat manfaat dengan adanya interaksi itu. Itu yang kemudian kita sebut sebagai sinergi yang positif. Oleh karena itu dimasa depan kita akan melakukan suatu treatment-treatment baru dalam rangka upaya kita untuk menggalang kebersamaan seluruh potensi dari Golkar yang telah menyatukan aspirasinya kepada Golkar.

Jadi oleh karena itu saya menyambut apa yang dikatakan tadi bahwa saya harus datang ke pusatnya LDII, kalau saya tidak datang itu artinya tidak bersinergi positif. Nah tinggal soal waktunya nanti diatur oleh Mas Warno, kemudian dengan Pak Irsyad akan mengatur nanti waktunya kapan yang tepat, soal waktu saja, tetapi kalau dalam hati sudah selalu dekat karena di seluruh organisasi keagamaan Islam di lingkungan Golkar, terus terang saya katakan yang paling duluan saya kenal itu adalah LDII, karena apa ? Karena saya waktu kampanye tahun 1977 pertama kali di Jawa Timur saya ke Kediri bersama-sama antara lain dengan almarhum Pak Gandi, kemudian juga dengan almarhum Pak Isman, saya pernah ke Kediri dan saya pernah datang ke LDII mungkin saudara saja yang lupa barang kali. Jadi dengan demikian saya punya hubungan emosional dengan LDII ini, lihat mukanya Mas Suarno tadi saya sudah langsung ingat

kita bangun sekarang ini, Golkar yang mandiri, yang demokratis, mengakar responsif dan yang solid. Itulah visinya. Dan kemudian misi kita pertegas kembali paling tidak ada tiga misi. Pertama : Misi kita itu untuk memperjuangkan menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, untuk kita perjuangkan menjadi keputusan-keputusan politik yang mempunyai dampak kepada masyarakat. jadi kita menyerap aspirasi memperjuangkan menjadi keputusan-keputusan yang bersifat politik yang mempunyai dampak publik (itulah yang pertama misi kita).

Kemudian yang kedua : adalah kita melakukan rekrutmen dari pada kader-kader politik, kader-kader Golkar untuk menduduki posisi-posisi politik dimana posisi politik yang diduduki kader Golkar kita pergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat yang kita perjuangkan aspirasinya. Nah kedudukan-kedudukan politik itu seperti apa ? yaitu misalnya : lembaga-lembaga perwakilan, lembaga-lembaga permusyawaratan baik ditingkat II, tingkat I maupun di pusat. Kemudian juga pemerintah kita di eksekutif, yaitu lembaga-lembaga misalnya jabatan Walikota, Bupati, Gubernur, bahkan juga Presiden itu adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan politik, atau jabatan. Jabatan politik itulah yang kita perjuangkan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi sumber kekuatan kita.

Kemudian yang ketiga adalah : kita akan meningkatkan upaya-upaya komunikasi politik. Dalam rangka pendidikan politik dan juga dalam rangka untuk meningkatkan intensitas sub komunikasi Golkar dengan rakyat. Oleh karena itu kita akan meningkatkan intensitas maupun volume dari pada komunikasi politik antara Golkar dengan rakyat, sehingga dengan demikian Golkar itu betul-betul dirasakan sebagai sarana, sebagai wahana dengan penyalur aspirasi dan kepentingan dari rakyat. Nah, itulah yang menjadi misi kita. Dengan demikian misi dimasa depan antara Golkar dengan LDII juga seharusnya akan kita tingkatkan komunikasinya, karena LDII adalah merupakan bagian dari rakyat, karena LDII adalah merupakan jembatan Golkar untuk memperkuat basis-basisnya di tengah-tengah rakyat. Tanpa adanya sarana, wahana, seperti LDII ini maka tidak mungkin Golkar itu mempunyai basis-basis pendukung yang ada di tengah-tengah rakyat. Dengan adanya hubungan-hubungan LDII dengan rakyat, maka LDII pun juga akan menyakinkan rakyat bahwa pilihan terbaik dalam Pemilu tidak lain adalah Golongan Karya. Nah, itulah misi kita saudara-saudara, itulah Golkar kita yang baru sekarang ini. Tetapi harus kita pahami bahwa Golkar yang sekarang ini tetap merupakan kelanjutan dari yang lama. Golkar yang sekarang ini tetap adalah Golkar yang dilahirkan 20 Oktober 1964,

Golkar yang sekarang ini adalah tetap Golkar yang satu kepastian dimana yaitu yang membela, mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi bila mana ada orang yang ingin membentuk negara/ memperjuangkan negara di luar negara kesatuan, maka Golkar harus sepontan melawan kekuatan-kekuatan itu. Doktrin perjuangan Golkar itu tetap yaitu : Karya, Siaga, Gatra, Praja, yang artinya bahwa Golkar itu siap sedia untuk membela bangsa negara.

Pelaksanaan dari pada Doktrin itu kita mempunyai ikrar yang kita sebut sebagai " Panca Bakti". Ikrar itu juga tetap, yang membedakan adalah kita memiliki komitmen baru tekat baru, sikap baru, yang menjadikan Golkar itu berbeda dengan Golkar yang lama. Yang berikutnya saya ingin sampaikan yaitu bagaimana posisi Golkar dikaitkan dengan perjalanan bangsa kita, saudara-saudara, sekarang ini orang mencoba membangun citra, bahwa Golkar ini selain merupakan bagian dari masa lalu, juga berperan pada masa lalu. Dimana Golkar adalah merupakan kekuatan yang mayoritas, sehingga kesalahan-kesalahan masa lalu itu seolah-olah dilimpahkan semuanya kepada Golkar, sehingga Golkar itu diminta untuk minta maaf atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, bagaimana posisi kita melihat ini ?

Saudara-saudara, kalau dilihat dari prospektif sejarah bahwa memang pada masa yang lalu itu terutama pada masa Orde Baru Golkar merupakan bagian Integral dari pada Orde Baru. Seluruh produktif konstitusional dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Tentu dengan melibatkan seluruh ketentuan- ketentuan tadi. Misalnya di MPR, produk-produk MPR itu ditetapkan oleh fraksi-fraksi antara lain memang ada fraksi Golkar/fraksi karya selain juga fraksi-fraksi yang lain. Kalau kita lihat prospektif masa lalu katakalah pada masa itu kita ada kesalahan, itu semua adalah kesalahan kolektif kita/kesalahan kita bersama. Tetapi apakah Golkar lepas dari tanggung jawab? Tidak! Sekali lagi tidak. Kita tentu bertanggung jawab terhadap masa lalu, setidak-tidaknya secara moral dan politis kita terus bertanggung jawab.

Nah, bagaimana kita memperbaiki rasa tanggung jawab kita itu ? Sebagai rasa tanggung jawab kita maka kita perbaiki. Kedepan kita koreksi, kita tidak mau lagi terjadi peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Keyakinan itu harus betul-betul kita miliki, karena kita yakin Golkar itu yang terbaik. Dari wawasan Golkar kita anggap yang terbaik, dari visi Golkar kita anggap yang terbaik, cita-cita perjuangan Golkar kita anggap yang terbaik, dari segi SDM di lingkungan Golkar kita anggap juga yang terbaik. Dari sikap Golkar untuk mampu menghimpun seluruh potensi bangsa ini adalah organisasi kekuatan sosial

politik yang mempunyai [illegible] Golkar adalah yang terbaik. Bahwa Golkar pada masa lalu juga turut mengambil keputusan dan turut bertanggungjawab, bahwa Golkar di masa yang lalu juga ada kekeliruan, ada kekhilafan, itu betul. Itulah yang kita koreksi yang kita perbaiki dengan citra yang baru. Tetapi kita tetap yakin bahwa Golkar ini adalah tetap yang terbaik di bandingkan partai-partai yang ada, termasuk partai-partai yang baru itu. Nah, sikap inilah yang saya minta saudara-saudara betul-betul fahami. Dengan demikian kita memiliki kepercayaan diri yang kuat, kita tidak ragu-ragu bila dikatakan bahwa Golkar dimasa lalu berbuat keliru, betul ! Tapi kita perbaiki kekeliruan itu, tapi apa Golkar saja ? Tidak ! Semua kita ikut keliru, apakah Golkar perlu minta maaf ? Tidak ! Karena bukan Golkar saja yang salah.

Tapi apakah itu yang menjadi soal buat kita ? Yang menjadi soal adalah kedepan, bahwa pada masa lalu adalah, merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagai bangsa kita pernah mengalami Demokrasi Parlementer, sebagai bangsa kita pernah mengalami Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama, sebagai bangsa kita pernah mengalami Orde Baru. Itu adalah bagian dari perjalanan bangsa kita yang kita yakini kedepan akan menjadi bangsa kita itu semakin dewasa, semakin matang, semakin tua, karena belajar dari kekeliruan-kekeliruan pada masa yang lalu. Dan kita bertekad tidak membuat kesalahan yang sama.

Karena itulah saudara-saudara, barangkali yang penting dikemukakan tadi adalah, bahwa salah satu yang membuat kesalahan, kekeliruan kita pada masa yang lalu adalah kita tidak mampu mengimbangi kekuasaan yang terpusat pada satu orang.

Kekuasaan itu terpusat pada satu orang karena apa ? Karena orang itu terlalu lama berkuasa. jadi kalau orang terlalu lama berkuasa cenderung ia menyalah gunakan kekuasaan. Nah inilah antara lain yang kita koreksi. Oleh karena itu yang kita perjuangkan dalam Sidang Istimewa yang akan datang adalah bidang masa jabatan Presiden kita batasi, menurut konstitusi kita memang dikatakan, masa jabatan Presiden itu adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali. Timbul kontroversi tentang dapat dipilih kembali. Secara teoritis mengatakan dapat dipilih kembali itu, yang bisa berkali-kali. Tapi dalam praktek politik dan pengalaman- pengalaman kita bernegara tidak saja pengalaman bangsa kita, juga pengalaman bangsa-bangsa lain. Apabila kekuasaan itu terlalu lama, maka kekuasaan itu cenderung disalah gunakan. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi ketentuan konstitusi bahwa masa jabatan itu hanyalah satu kali. Itu adalah tugas majelis membuat putusan dengan tidak mengurangi apa yang

sampai lima tahun yang kedua, yaitu menjadi maksimal adalah sepuluh tahun. Dan ternyata negara-negara bangsa-bangsa lain pun kita melihat juga hal yang sama, misalnya Amerika. Amerika juga maksimal dua kali. Masa jabatan Presiden itu bahkan empat tahun kemudian ditambah dua tahun. Amerika juga pernah mengalami pada suatu waktu masa jabatan lebih, tapi mereka koreksi. Karena itulah kita ingin menjadikan bangsa kita menjadi mantap, dewasa, kokoh dan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman pada masa yang lalu yang juga kita perbaiki. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang saudara-saudara dalam era reformasi ini. Oleh karena itu, tentu saja bila mana kita yakin dan percaya bahwa Golkar tetaplah yang terbaik. Dimana kita juga bertekad untuk mengoreksi kesalahan yang lalu. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya selaku Ketua Umum DPP Golkar minta restu, minta dukungan, minta partisipasi dari saudara-saudara agar Golkar dalam Pemilu yang akan datang tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itulah harapan kami dan kami akan bekerja lebih baik lagi, akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi dan akan bekerja lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Termasuk tentunya aspirasi dan kepentingan dari pada DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Demikianlah saudara-saudara sekalian pokok-pokok sambutan atau pengarahan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberkati dan melindungi perjuangan dari pada kita semua. Baik perjuangan Golkar dan demikian pula perjuangan LDII. Hanya dengan ridho Alloh lah kita akan yakin, bahwa hari depan kita akan lebih baik.

Itulah saudara-saudara sekalian mudah-mudahan apa yang saya kemukakan tadi ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Dan karena jam setengah empat ini saya harus keluar kota, maka sekaligus saya mohon izin, terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Transkrip sambutan langsung tanpa teks
Pada MUNAS V LDII.
Dokumen/rekaman asli ada pada DPP LDII

Jakarta, 24 Oktober 1998

Tentang

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrohmaanirrohim

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 1998 di Jakarta.

b. bahwa guna menunjang kelancaran dan ketertiban jalannya rapat-rapat dan permusyawaratan dalam MUNAS V tersebut perlu adanya Pimpinan MUNAS V LDII

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan Dewan Pimpinan Pusat LDII tentang Pimpinan Musyawarah Nasional V LDII.

Mengingat :

1. Keputusan DPP LDII Nomor : 11/KEP/DPP LDII/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 tentang penyelenggaraan MUNAS LDII 1998 di Jakarta.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUNAS V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Komposisi dan personalia Pimpinan MUNAS V LDII tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ir. H. A.J. Karim Abu Syaifan, MSc.	(DPP LDII)
Wakil Ketua	: R. H. Sanusi Kurnaen Rasyidi, SH	(DPP LDII)
Wakil Ketua	: H. R. Sunaryo, SH, MM	(DPP LDII)
Sekretaris	: Ir. H. P. Sunaryo, M.Si	(DPP LDII)
Anggota	:	
	1. Ir. H. Nengah Sutika, MSc	(SUL-SEL)
	2. H. Selamat, SH	(SUMUT)
	3. Ir. H. Indarto	(JABAR)
	4. H.A. Rahman Ruyima, SE, MM	(KALTIM)
	5. H.M. Soehartono Rijadi, MBA	(DPP LDII)

PASAL 2

Pimpinan MUNAS V LDII merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

PASAL 3

Tugas dan Wewenang Pimpinan MUNAS V LDII adalah:
a. memimpin sidang-sidang selama MUNAS V LDII.
b. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan MUNAS V LDII.

PASAL 4

Pembagian tugas diantara unsur-unsur Pimpinan MUNAS V LDII diatur lebih lanjut di dalam ketetapan pimpinan MUNAS V LDII

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua Umum,

H. Hartono Slamet

Sekretaris Jendral,

H. Ahmad Alfurqon

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
NOMOR : 01/MUNAS-V/LDII/1998

Tentang:

PERATURAN TATATERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Bismillaahirrohimaanirrohim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 1998 di Jakarta;

b. bahwa untuk mencapai hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional tersebut huruf a perlu adanya Tata Tertib Musyawarah Nasional V LDII;

c. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V LDII.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
2. Surat Keputusan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 111/KEP/DPP LDII/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 tentang penyelenggaraan MUNAS V LDII.

Rancangan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS V LDII

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib MUNAS V LDII secara lengkap dan terinci adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib seperti dimaksud dalam diktum pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama MUNAS V LDII.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, MSi

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS V LDII
Nomor : 01/MUNAS-V/LDII/1998
Tanggal : 24 Oktober 1998

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan selanjutnya dalam peraturan tata tertib ini disebut MUNAS V.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya MUNAS V berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, Tap MPR No. II/MPR/1998 Tentang GBHN, UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(3) Peserta adalah peserta MUNAS V.
(4) Peninjau adalah peninjau MUNAS V.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

MUNAS V mempunyai tugas dan wewenang untuk:

a. menetapkan/mengubah/menyempurnakan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
b. menetapkan/mengubah/menyempurnakan Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
c. mengeluarkan pernyataan dan garis-garis kebijaksanaan Organisasi,
d. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990 - 1998,
e. memilih dan mengangkat Dewan Pembina/Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998 - 2003,

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

(1) Peserta terdiri dari :
   a. Dewan Pembina Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
   b. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
   c. Utusan Perwakilan DPD Tk. I dan DPD Tk. II Lembaga Dakwah Islam Indonesia; dan
   d. Tokoh Ulama' yang diundang DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(2) Jumlah dan perincian peserta diatur oleh DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(3) Setiap peserta wajib membawa dan menyerahkan surat mandat.
(4) Ketentuan mengenai surat mandat diatur DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 4

(1) Peninjau adalah tamu atau undangan selain peserta.
(2) Ketentuan dan jumlah peninjau diatur oleh DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Peserta berhak untuk :
a. mengajukan pertanyaan,
b. mengajukan usul-usul perubahan/perbaikan,
c. mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis,
d. memberikan suara dalam hal keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dan
e. memilih dan dipilih.

Pasal 6

(1) Setiap peserta berhak untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan MUNAS V.
(2) Pertanyaan yang diajukan harus singkat dan jelas.
(3) Apabila dipandang perlu Pimpinan MUNAS V dapat merundingkan mengenai bentuk, sifat dan isi dari pertanyaan kepada yang bertanya.

Pasal 7

(1) Setiap peserta wajib mengikuti acara-acara dalam pelaksanaan MUNAS V.
(2) Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketantuan dalam peraturan tata tertib ini.

BAB V
KELENGKAPAN MUNAS

Pasal 8

Kelengkapan MUNAS V disusun sesuai kelompok kegiatan yang dibutuhkan

Pasal 9

MUNAS V mempunyai kelengkapan sebagai berikut:
a. Pimpinan;
b. Komisi-komisi; dan
c. Sekretaris.

BAB VI
PIMPINAN MUNAS

Pasal 10

(1) MUNAS V dipimpin oleh pimpinan MUNAS V yang ditetapkan oleh DPP LDII.
(2) DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertindak sebagai pimpinan MUNAS V sementara.
(3) Pimpinan MUNAS V adalah kolektif terdiri dari 9 orang yaitu dari unsur Dewan Pembina, Unsur DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan unsur perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
(4) Komposisi pimpinan MUNAS V terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan lima (5) orang Anggota.

BAB VII
KOMISI-KOMISI

Pasal 11

(1) MUNAS V membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan
(2) Komisi-komisi MUNAS V dapat berbentuk sub komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Komisi MUNAS V bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam sidang Komisi mengenai masalah-masalah yang menjadi lingkup tugasnya.
(2) Pembicaraan dalam sidang komisi disusun dalam suatu risalah.
(3) Dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari para anggota Komisi yang bersangkutan, Pimpinan Komisi menyusun laporan hasil Sidang Komisi dengan dibantu oleh Sekretaris Panitia MUNAS V.
(4) Laporan hasil Sidang Komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi kemudian dibacakan oleh juru bicara Komisi yang bersangkutan dalam sidang Paripurna, naskah diserahkan kepada Pimpinan Sidang Paripurna tersebut.

Pasa 13

(1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu Komisi MUNAS V.
(2) Jumlah dan nama-nama anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS V dalam suatu sidang Paripurna.
(3) Pimpinan MUNAS V dapat menghadiri dan turut serta pada semua Sidang Komisi.

Pasal 14

(1) Pimpinan Komisi bersifat kolektif dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

(3) Setelah Pimpinan Komisi terbentuk maka unsur Pimpinan MUNAS V tersebut menyerahkan kepada Pimpinan Komisi terpilih untuk melanjutkan memimpin Sidang Komisi.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG
SERTA TATA TERTIB PEMBICARA

Pasal 15

MUNAS V mempunyai jenis-jenis sidang sebagai berikut:
a. Sidang Paripurna;
b. Sidang Pimpinan; dan
c. Sidang Komisi.

Pasal 16

(1) Peserta yang akan berbicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.
(2) Peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
(3) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
(4) Ketua Sidang dapat menentukan batas waktu bagi pembicara.
(5) Bila pembicara telah melampaui batas waktu dalam pembicaraan, maka Ketua Sidang dapat memperingatkan agar yang bersangkutan segera mengakhiri pembicaraannya, dan pembicara harus mengindahkan.
(6) Apabila Ketua Sidang hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia menyerahkan pimpinan sidang kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan tempat pimpinan.
(8) Semua pertanyaan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan Sidang.
(9) Pimpinan Sidang berhak menyimpulkan maksud dari pertanyaan tersebut.

Pasal 17

(1) Interupsi diperbolehkan bagi peserta maksimal selama 3 (tiga) menit untuk kepentingan sebagai berikut:
   a. minta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan,
   b. mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan, dan
   c. mengajukan usul menunda sidang untuk sementara.

Pasal 18

(1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah.
(2) Apabila seseorang pembicara menggunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan sidang maka pimpinan sidang memberi nasihat atau peringatan agar yang bersangkutan berbuat tertib kembali.
(3) Apabila tidak mengindahkan peringatan dari Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan agar yang bersangkutan tidak meneruskan mengikuti sidang tersebut.

Pasal 19

Setiap sidang dibuat risalah tertulis atau rekaman yang memuat antara lain:
a. tempat dan acara sidang,
b. hari, tanggal dan jam sidang,
c. Ketua dan Sekretaris sidang,
d. nama-nama peserta yang hadir,
e. nama pembicara dan pendapatnya, dan
f. keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

BAB IX
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

(1) Sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta.
(2) Sidang paripurna untuk pemilihan dan membentuk komisi-komisi sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta.

Pasal 21

(1) Tiap peserta mempunyai satu hak suara.
(2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila :

serta yang sebanyaknya hadir dalam sidang tersebut.
b. disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang memenuhi kuorum.

Pasal 22.

(1) Dalam hal pungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, maka pungutan suara diulang lagi.
(2) Apabila hasil ulang pungutan suara masih menunjukkan jumlah yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan MUNAS V LDII.

Pasal 23

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung kecuali yang sifatnya rahasia.

Pasal 24

Untuk menetapkan/mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka:
a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang harus hadir, dan
b. disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta yang hadir.

BAB X
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PROGRAM UMUM

Pasal 25

(1) Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
(2) Masing-masing Perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut melalui juru bicara dalam suatu pandangan umum pada sidang paripurna.
(3) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia menggunakan hak jawabnya atas pandangan umum.

Pasal 36

Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia ditetapkan dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.

Pasal 27

(1) MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia melalui pemilihan langsung.

(2) Pemilihan yang dimaksud pasal 27 ayat 1 adalah untuk memilih jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih dimaksud pasal 27 ayat 2 diberi wewenang untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 28

(1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta.

(2) Dengan terpilihnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai mana termasuk pasal 27, maka Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998 dinyatakan demisioner.

Pasal 29

(1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengumumkan komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998 - 2003 pada sidang paripurna terakhir.

(2) MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia memberikan pengesahan atas hasil kerja Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut.

Pasal 30

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah:

a. anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi,
c. telah membuktikan peranserta secara aktif dan pengabdiannya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut,

BAB XII
SEKRETARIAT PANITIA

Pasal 31

(1) Sekretariat panitia MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia dipimpin oleh Ketua Sekretariat yang bertanggung jawab kepada pimpinan MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

(2) Ketua Sekretariat dibantu oleh Staf Sekretariat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Segala sesuatu yang belum diatur untuk menampung perkembangan keadaan dalam peraturan tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian oleh MUNAS V.

Pasal 33

Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua,



Sekretaris,

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc.

Ir. H.P. Sunaryo, MSi

Tentang

JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrohimaanirrohim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 1998 di Jakarta;

b. bahwa untuk menunjang agar pelaksanaan MUNAS V tersebut berjalan dengan tertib, lancar dan sukses perlu ditetapkan suatu jadwal Acara Musyawarah Nasional V LDII;

c. jadwal acara Musyawarah Nasional V LDII.

Mengingat :

1. Keputusan DPP LDII Nomor : 111/KEP/DPP LDII/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 tentang penyelenggaraan MUNAS V LDII.

2. Keputusan MUNAS V LDII Nomor : 01/KEP/MUNAS-V/LDII/1998 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS V LDII.

Memperhatikan: Permusyawaratan dalam MUNAS V LDII yang membahas Rancangan Keputusan tentang jadwal Acara MUNAS V LDII.

Pasal 1

Jadwal Acara MUNAS V LDII secara lenghap dan terinci adalah seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum Pasal 1 keputusan ini merupakan pedoman dalam menyelenggarakan MUNAS V LDII.

Pasal 3

Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan maka dapat diadakan perubahan Jadwal Acara tersebut Pasal 1 dengan persetujuan MUNAS V LDII.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris

MUSYAWARAH NASIONAL V LDII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, MSi

		7. Do'a 8. Istirahat	10.00-10.15	
	SIDANG PARIPURNA I	Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum untuk penetapan: - Pimpinan Sidang - Sidang Paripurna Untuk menetapkan: a. Tata tertib sidang b. Jadwal Acara.	10.15-11.15	Ketua Umum & Sekjen
	SIDANG PARIPURNA II	1. Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII 2. Laporan Daerah 3. Istirahat	11.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00	H. Hartono Slamet
	SIDANG PARIPURNA III	1. Laporan 2. Penjelasan Materi MUNAS 3. Sidang Komisi A, B dan C dilanjutkan dengan pengesahan sidang hasil komisi. 4. Istirahat	14.00-15.30 15.30-16.00 16.00-17.00 17.00-19.00	Ketua SC Drs. H. Ahmad Suarno, MBA.
	SIDANG PARIPURNA IV	1. Pemilihan Langsung Ketua Umum dan Sekjen DPP LDII 2. Istirahat 3. Pengumuman Personalia Dewan Pimpinan Pusat LDII 4. Sambutan Ket. LPSI	19.30-20.30 20.30-20.45 20.45-21.00 21.00-selesai	H. Rudini

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrohimaanirrohim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang:

a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. bahwa seiring dengan perkembangan yang sangat cepat di era reformasi yang dihadapi bangsa Indonesia, menganggap perlu untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, agar peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu Keputusan MUNAS V LDII tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Keputusan MUBES IV Lemkari No. IV/MUBES IV/Lemkari/ 1990 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 01/MUNAS-V/LDII/1998 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

3. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998
4. Hasil sidang Komisi MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Pandangan umum, usul serta saran peserta MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Musyawarah Besar IV Lembaga Karyawan Dakwah Islam.

Pasal 2

Naskah perubahan dan penyempurnaan sebagai mana dimaksud Pasal 1 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Penyesuaian terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LDII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, MSi

MOTTO:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة ال عمران ١٠٤

Artinya: "Dan Hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran ayat 104)

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ سورة يوسف ١٠٨

Artinya: "Katakanlah Inilah jalan (Agama) Ku, dan orang-orang yang mengikuti mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (Q.S. Yusuf ayat 108)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سورة النحل ١٢٥

Artinya: "Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik". (Q.S. Annahl ayat 125)

Bahwa dalam kehidupan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, mutlak diperlukan adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat Indonesia;

Tanpa mengurangi peranan golongan lain, umat Islam di Indonesia berkewajiban sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa, serta amal sholihnya di dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial, baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam menghadapi perubahan masyarakat yang demikian cepat pada era globalisasi dan era informasi yang berkembang saat ini Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan agama, harus cepat tanggap mengisi setiap peluang yang dapat meningkatkan peranserta semua unsur dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia guna mempercepat terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) harus mampu menumbuhkembangkan motivasi keagamaan dalam setiap keadaan dan bertindak proaktif sehingga nilai-nilai keagamaan tersebut akan menjadi dasar dan arah bagi kegiatan organisasi, individu pengurus, anggota serta masyarakat dan bangsa Indonesia, maka disusunlah Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai berikut:

BAB I
NAMA, STATUS, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama : Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan dapat disingkat LDII.

Pasal 2

Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 5

(1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia bermaksud menghimpun seluruh potensi bangsa, yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

(2) Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang Islami serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridloi Allah Subhanahu Wa ta'ala.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sebagai lembaga pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 7

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berfungsi sebagai wadah dan sarana bagi kaum muslimin dan muslimat serta da'i, da'iyat, mubaligh dan mubalighot di dalam mengkaji, melaksanakan amal dakwahnya dan mengabdikan segenap kemampuannya untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam Indonesia khususnya serta umat manusia dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 8, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengadakan kegiatan melalui upaya **Catur Sukses LDII** yang meliputi:

a. Sukses **pertama** adalah bidang **Peningkatan Kinerja Organisasi.**
   1) Menata dan meningkatkan keberadaan dan kinerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang menitikberatkan pada kegiatan keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang mendorong tercapainya tujuan nasional.
   2) Bekerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah dan pranata sosial lainnya yang mempunyai kegiatan dan tujuan yang sama dengan lembaga ini dalam menggerakkan peranserta masyarakat.

b. Sukses **kedua** adalah bidang **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**
   1) Menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai insan yang mengutamakan pembentukan nilai-nilai antara lain beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ilmu dan ajaran agama, bersikap amanah, sadar akan harga diri dan bangsa, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
   2) Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki etos kerja yang produktif, keterampilan, kreatif, disiplin, profesional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen.

3) Turut serta mengarahkan potensi cendekiawan, profesi praktisi, pengusaha, wanita, generasi muda untuk melakukan pengabdian masyarakat di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kesempatan bekerja, berusaha dalam bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi umat.

3) Berupaya mengembangkan potensi dan mendayagunakan sumberdaya secara bijaksana agar diperoleh nilai optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Turut serta mengupayakan tercapainya perluasan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri, dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja yang terbuka sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahliannya. Menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik pada sektor formal maupun informal melalui usaha bersama dan koperasi.

d. Sukses **keempat** adalah bidang **Peran Serta Sosial dan Kemasyarakatan.**

1) Mengembangkan peranserta sosial dan kemasyarakatan menuju terwujudnya tujuan organisasi dengan mengembangkan sikap ukhuwah:
   a) meningkatkan kerjasama dan persaudaraan di kalangan umat Islam.
   b) mengembangkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
   c) memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah bangsa di dunia dalam rangka menempuh perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2) Berupaya meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejehteraan yang dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan sosial.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

(1) Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sukarela dan tidak mengikat serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia.

(2) Yang disebut anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang:
   a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
   d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII, seluruh keputusan musyawarah/rapat-rapat dan Peraturan Organisasi; dan
   e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan Program Kerja Organisasi.

Pasal 11

Setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan kedudukan yang sama terhadap hukum, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

b. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP, untuk tingkat Pusat;
b. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I disingkat DPD Tk. I untuk tingkat Provinsi;
c. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II disingkat DPD Tk. II untuk tingkat Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif;
d. Pimpinan Cabang disingkat PC, untuk Kecamatan; dan
e. Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC, untuk tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 13

Pembentukan Perwakilan Organisasi di Tingkat Daerah menunjuk pada pasal-pasal 12b, c, d, dan e, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri atas:
a. Dewan Penasihat;
b. Dewan Pimpinan Pusat;
c. Dewan Penasihat Tingkat I;
d. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I;
e. Dewan Penasihat Tingkat II;
f. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II;
g. Pimpinan Cabang; dan
h. Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 15

Personalia kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Anggota organisasi dengan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II dipilih oleh Musyawarah Daerah Tingkat II dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I.
(4) Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II.
(5) Pimpinan Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II melalui Pimpinan Cabang.

Pasal 17

Periode Kepengurusan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Organisasi ini mempunyai 5 (lima) tingkatan musyawarah sebagai berikut:
a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS;
b. Musyawarah Daerah Tingkat I, disingkat MUSDA Tk. I;
c. Musyawarah Daerah Tingkat II, disingkat MUSDA Tk. II;
d. Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB; dan
e. Musyawarah Anak Cabang, disingkat MUSACAB.

Pasal 20

Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat Organisasi di semua tingkat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah (1/2) jumlah peserta yang diundang.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 23

Kekayaan organisasi dapat diperoleh dari:

a. modal pertama pada waktu mendirikan organisasi;
b. wasiat-wasiat, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, organisasi sosial maupun pemerintah;
c. derma-derma yang sifatnya tetap/tidak tetap dan tidak mengikat;
d. dana-dana lain yang diperoleh dari usaha tersebut dalam pasal 9 (sembilan); dan
e. usaha-usaha lain yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu Wa ta'ala.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

Setiap perubahan yang diadakan di dalam Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini dianggap sah, apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara peserta Musyawarah Nasional yang hadir.

Pasal 25

Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menyatakan pembubaran bilamana ternyata bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya.

Pasal 27

Jika Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan perundangan yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan (membereskan) utang-piutang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai, "TUGAS DAN KEGIATAN" dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua,

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, M.Sc

Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H.P. Sunaryo . M.Si

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Setiap anggota organisasi mempunyai hak untuk:

a. mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tulisan;
b. memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi;
c. mendapat perlindungan organisasi; dan
d. hak-hak lain sebagai anggota yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Setiap anggota organisasi mempunyai kewajiban untuk:

a. taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi;
b. melaksanakan program kerja, keputusan dan kebijaksanaan organisasi;
c. membela eksistensi organisasi; dan
d. menjaga, mempertahankan, dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

Pasal 3

Keanggotaan organisasi berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. berhenti sebagai anggota atas permohonan sendiri; dan
c. berhenti sebagai anggota bukan atas permohonan sendiri.

Pasal 4

(1) Sanksi disiplin dapat diterapkan kepada anggota yang melakukan:
    a. perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan disiplin organisasi;
    b. perbuatan yang merugikan dan mencemarkan organisasi.

Pasal 5

Ketentuan tentang Prosedur Tetap (protap) atau tata cara menjadi anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin anggota diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB II

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI PENGURUS
DPP, DPD TINGKAT I, DPD TINGKAT II, PC, DAN PAC

Pasal 6

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LDII adalah sebagai berikut:

a. anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi,
c. tidak pernah terlibat G 30 S/PKI,
d. telah membuktikan peranserta secara aktif dan pengabdiannya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedikitnya:
    1) selama 5 (lima) tahun berturut-turut bagi pengurus DPP dan DPD Tk. I.
    2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut bagi pengurus DPD Tk. II, PC dan PAC.
e. memiliki kemampuan, kesanggupan dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif dalam tugas organisasi, dan
f. terpilih melalui musyawarah/rapat organisasi yang telah ditentukan, sesuai tingkatan organisasi.

BAB III

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Kepengurusan organisasi terdiri dari:

a. di tingkat Pusat:
    1) Dewan Penasihat,
    2) Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 8

Dewan Penasihat mempunyai komposisi sebagai berikut:

a. seorang Ketua,
b. dua orang Wakil Ketua,
c. seorang Sekretaris, dan
d. anggota-anggora yang jumlahnya menurut kebutuhan.

Pasal 9

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempunyai komposisi sebagai berikut:

a. seorang Ketua Umum;
b. beberapa orang Ketua;
c. seorang Sekretaris Jenderal;
d. beberapa orang wakil Sekretaris Jenderal;
e. seorang Bendahara dan dua Wakil Bendahara; dan
f. departemen-departemen terdiri dari:
   1) Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
   2) Departemen Hubungan Antar Lembaga.
   3) Departemen Penerangan dan Media Massa.
   4) Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah.
   5) Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan.
   6) Departemen Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
   7) Departemen Koperasi, Wirausaha dan Tenaga Kerja.
   8) Departemen Peranan Wanita, dan Kesejahteraan Keluarga.
   9) Departemen Penelitian dan Pengembangan, IPTEK dan Lingkungan Hidup.
   10) Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum.

Pasal 11

Susunan Kepengurusan DPD Tingkat I terdiri dari:

a. seorang Ketua,
b. beberapa orang Wakil Ketua,
c. seorang Sekretaris,
d. beberapa orang Wakil Sekretaris,
e. seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara, dan
f. biro-biro menurut kebutuhan.

Pasal 12

Dalam lingkup Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dewan Penasihat Tingkat II yang komposisi dan Personalianya disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pasal 13.

Susunan Kepengurusan DPD Tingkat II terdiri dari:

a. seorang Ketua,
b. beberapa orang Wakil Ketua,
c. seorang Sekretaris,
d. beberapa orang Wakil Sekretaris,
e. seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara, dan
f. bagian-bagian menurut kebutuhan.

Pasal 14

Susunan kepengurusan PC terdiri dari:

a. seorang Ketua,
b. beberapa orang Wakil Ketua,
c. seorang Sekretaris,
d. seorang Wakil Sekretaris,
e. seorang Bendahara, dan
f. seksi-seksi menurut kebutuhan.

Pasal 16

(1) Di semua tingkat kepengurusan terdapat Pengurus Harian yang berkewajiban melaksanakan tugas sehari-hari terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan kepengurusan kolektif.

(2) Jumlah personal masing-masing Departemen, Biro-biro, Bagian-bagian, Seksi-seksi dan Urusan-urusan ditentukan menurut kebutuhan.

Pasal 17

Urusan kesekretariatan tingkat pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

Di daerah-daerah dipimpin oleh Sekretaris sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 18

Dewan Penasihat merupakan suatu badan yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan nasihat, pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya

Pasal 19

DPP mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin dan menyelenggarakan organisasi tingkat nasional serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional,
b. melakukan usaha mengendalikan organisasi sesuai dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan organisasi,
c. mengadakan bimbingan terhadap DPD Tingkat I di seluruh Indonesia,

Pasal 20

DPD Tingkat I mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin dan menyelenggarakan organisasi Tingkat Provinsi,
b. melaksanakan keputusan dan petunjuk DPP sesuai dengan AD/ART,
c. mengadakan bimbingan terhadap DPD Tingkat II,
d. memelihara dan memperkokoh integrasi serta kesatuan dan persatuan nasional,
e. merencanakan dan menyelenggarakan MUSDA Tingkat I, serta melaksanakan keputusan-keputusannya,
f. mengesahkan kepengurusan di Daerah tingkat II, dan
g. mengadakan komunikasi serta kerja sama dengan instansi pemerintah, ABRI maupun lembaga-lembaga dan organisasi yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Pasal 21

DPD Tingkat II mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin dan menyelenggarakan organisasi Tingkat Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif,
b. melaksanakan keputusan dan petunjuk DPP, DPD Tingkat I sesuai dengan AD/ART,
c. melakukan pengendalian, bimbingan terhadap PC, PAC di daerahnya,
d. memelihara dan memperkokoh integrasi serta kesatuan dan persatuan nasional,
e. merencanakan dan menyelenggarakan MUSDA Tingkat II, serta melaksanakan keputusan-keputusannya,
f. mengesahkan kepengurusan Tingkat Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang, dan
g. mengadakan komunikasi serta kerja sama dengan instansi pemerintah, ABRI maupun lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.

d. merencanakan dan menyelenggarakan MUSCAB,
e. memelihara dan memperkokoh integrasi serta kesatuan dan persatuan nasional, dan
f. mengadakan komunikasi serta kerja sama dengan instansi pemerintah, ABRI maupun lembaga-lembaga dan organisasi yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Pasal 23

PAC mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin dan menyelenggarakan organisasi Tingkat Desa atau Kelurahan,
b. melaksanakan keputusan dan petunjuk dari DPP, DPD Tingkat I, DPD Tingkat II, PC sesuai dengan AD/ART,
c. memelihara komunikasi serta kerjasama dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan setempat dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan,
d. memelihara dan memperkokoh integrasi serta kesatuan dan persatuan nasional, dan
e. merencanakan dan menyelenggarakan MUSACAB (Musyawarah Anak Cabang).

Pasal 24

Wewenang Dewan Pimpinan:

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
   1) mewakili organisasi keluar maupun ke dalam,
   2) mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I,
   3) memberikan bimbingan organisasi, dan
   4) memberikan surat-surat tanda penghargaan.
b. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II

Pasal 25

Pembagian tugas dan wewenang (Job Description) masing masing unsur atau elemen organisasi di tingkat pusat (menunjuk pasal 9), diatur dalam suatu Peraturan Organisasi (PO) yang dapat dijadikan pola penyusunan di tingkat daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN ANTARWAKTU

Pasal 26

(1) Lowongan personalia kepengurusan organisasi dapat terjadi karena adanya pengurus yang:
   a. meninggal dunia,
   b. mengundurkan diri, dan
   c. diberhentikan.
(2) Personalia pengisi lowongan tersebut pada ayat (1) disebut personal antar waktu
(3) Masa jabatan personal antarwaktu berlaku sampai masa jabatan yang digantikan berakhir
(4) Syarat-syarat pengisian lowongan personal antarwaktu diatur di dalam Peraturan Organisasi
(5) Dalam hal penggantian jabatan antar waktu sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini masih juga tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Pimpinan setingkat di atasnya dapat mengesahkan personal pengganti untuk melanjutkan masa jabatan yang digantikan berakhir.
(6) Personal antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, usulannya disampaikan oleh pengurus yang masih ada kepada Dewan pimpinan setingkat di atasnya.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27

(1) Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, waktu dan penyelenggaraanya ditentukan oleh DPP.

Pasal 28

(1) Musyawarah Nasional dihadiri oleh peserta sebagai berikut :
   a. Dewan Penasihat;
   b. Dewan Pimpinan Pusat;
   c. Dewan Penasihat Tingkat I;
   d. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I;
   e. Dewan Penasihat Tingkat II; dan
   f. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II.
(2) Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa sama seperti yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.
(3) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta
(4) Sebelum terpilih Pimpinan Musyawarah Nasional, DPP bertindak sebagai pimpinan sementara Musyawarah Nasional.

Pasal 29

(1) Musyawarah Daerah Tingkat I (MUSDA Tingkat I) dihadiri oleh:
   a. unsur Dewan Pimpinan Pusat;
   b. Dewan Penasihat Tingkat I;
   c. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I;
   d. Dewan Penasihat Tingkat II; dan
   e. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II.
(2) Pimpinan Musyawarah Daerah Tingkat I dipilih oleh dan dari peserta
(3) Sebelum terpilih Pimpinan Musyawarah Daerah Tingakat I, DPD Tingkat I bertindak sebagai pimpinan sementara MUSDA Tingkat I.

Pasal 30

(1) Musyawarah Dacrah Tingkat II (MUSDA Tingkat II) dihadiri oleh :
   a. unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I;
   b. Dewan Penasihat Daerah Tingkat II;

Pasal 31

(1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh:
   a. unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II;
   b. Pimpinan Cabang; dan
   c. unsur Pimpinan Anak Cabang.
(2) Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih oleh dan dari peserta
(3) Sebelum terpilih Pimpinan Musyawarah Cabang (MUSCAB), Pimpinan Cabang bertindak sebagai pimpinan sementara MUSCAB.

Pasal 32

(1) Musyawarah Anak Cabang (MUSACAB) dihadiri oleh :
   a. unsur Pimpinan Cabang dan
   b. anggota pengurus Pimpinan Anak Cabang
(2) Pimpinan Musyawarah Anak Cabang (MUSACAB) dipilih dari dan oleh peserta.
(3) Sebelum terpilih Pimpinan Musyawarah Anak Cabang (MUSACAB) Pimpinan Anak Cabang bertindak sebagai pimpinan sementara MUSACAB.

Pasal 33

(1) Rapat-rapat organisasi terdiri dari :
   a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan oleh DPP;
   b. Rapat Kerja Daerah Tingkat I (RAKERDA Tingkat I) diselenggarakan oleh DPD Tingkat I;
   c. Rapat Kerja Daerah Tingkat II (RAKERDA Tingkat II) diselenggarakan oleh DPD Tingkat II;
   d. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang; dan
   e. Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERACAB) diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

BAB VII
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 35

Keuangan organisasi diperoleh dari sumbangan sah dan tidak mengikat

BAB VIII
LAGU DAN LAMBANG

Pasal 36

Lagu, Lambang dan Atribut Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 37

(1) Setiap musyawarah dan rapat-rapat di semua tingkat, mencapai kuorum dan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih dari jumlah peserta yang diundang.

(2) Apabila musyawarah atau rapat-rapat belum mencapai kuorum sebagaimana ketentuan dalam ayat (1) ini, musyawarah atau rapat-rapat dapat ditunda dan ditangguhkan pada hari lain dengan memberikan undangan ulangan.

(3) Apabila undangan ulangan telah dilakukan cukup tiga kali dan ternyata kuorum tidak pula tercapai, maka kepada pengurus/pengundang dibenarkan untuk mengambil kebijaksanaan lain, yaitu melakukan musyawarah/rapat-rapat tesebut dengan tidak tergantung pada jumlah peserta yang hadir.

(3) Apabila kepatusan musyawarah atau rapat-rapat tidak juga mencapai suara aklamasi mantap maka keputusan diambil atas dasar suara lebih dari setengah (1/2) yang hadir.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah melalui Musyawarah Nasional, yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah Nasional.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 40

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua,



Sekretaris,

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc.

Ir. H.P. Sunaryo, MSi.

PROGRAM UMUM
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrohmaanirrohiim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang:

a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah dan menetapkan Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
b. bahwa Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganggap perlu untuk menetapkan Program Umum seiring dengan perkembangan dan kemajuan Pembangunan Nasional yang terus berlangsung;
c. bahwa sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di seluruh Indonesia diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan sehingga peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan;
d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang perubahan Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor: 01/MUNAS-V/LDII/1998 tentang peraturan tata tertib Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.

4. Hasil sidang Komisi B MUNAS-V Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
5. Pandangan umum, usul serta saran para peserta MUNAS-V Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Mengubah dan menyempurnakan Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Musyawarah Besar (MUBES-IV) Lemkari.

Pasal 2

Naskah perubahan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Penyesuaian terhadap perubahan Program Umum ini, dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua,

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc.

MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Sekretaris,

Ir. H.P. Sunaryo, MSi.

PEMBUKAAN

Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia penerapannya harus benar-benar selaras hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, dan alam sekitarnya yang memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah. Selain itu mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat kebersamaan dalam mencermati dan menyikapi arus reformasi di berbagai bidang serta perkembangan lingkungan strategis yang bersifat nasional, regional, dan global.

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama, dan kualitas manusia Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat, hal ini karena menjelang akhir abad ke-20 dan menyongsong abad ke-21 yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, terjadi transformasi mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antarbangsa di dunia. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan; mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi, kebijakan memacu investasi telah mendorong masuknya modal, teknologi, dan manajemen ke suatu negara, kesepakatan negara-negara melakukan perdagangan bebas, telah berdampak pada semakin kaburnya batas suatu negara. Era ini di samping membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia terutama kualitas akhlaknya.

Bahwa LDII dalam peransertanya mewujudkan Tujuan Nasional senantiasa konsisten melakukan amal nyata melalui upaya meningkatkan kualitas

Bahwa keberhasilan dan prestasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia dipelihara selaras keikutsertaan dan rasa tanggung jawab segenap umat Islam khususnya dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai memenuhi panggilan

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة آل عمران ١٠٤)

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan (umat) yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali-Imran 104).

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

–الأية (سورة النحل ١٢٥)

Artinya: Ajaklah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik (Q.S. Annahl 125).

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ – الأية (سورة الرعد ١١)

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S. Ar Ra'd 11).

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا۠ وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ –الأية (سورة يوسف ١٠٨)

Artinya: Katakanlah; Inilah jalan-Ku (agama-Ku), Aku dan orang-orang yang mengikuti/mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik (Q.S. Yusuf 108).

2. Pokok-pokok program Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan pencerminan kebersamaan kehendak dan tekad segenap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses Pembangunan Nasional.
3. Pokok-pokok program ini merupakan pedoman yang mengikat untuk dilaksanakan oleh segenap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
4. Pokok-pokok program ini merupakan kesinambungan, penyempurnaan, peningkatan, dan pembaharuan dari program-program pada kurun waktu yang lalu.

B. Maksud dan Tujuan

Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia dimaksudkan untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan Lembaga Dakwah Islam Indonesia selama kurun waktu 5 tahun mendatang dalam peransertanya melaksanakan Pembangunan Nasional yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat yang selaras dengan Program Nasional.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk ikut mewujudkan tercapainya Tujuan Nasional dengan menitikberatkan pada usaha-usaha sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya gerak dalam turut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat yang dinamis untuk mengembangkan kesinambungan Pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam ketetapan-ketetapan MPR.
2. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dengan bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Rosulullahu Sholallahu Alaihi Wasallam serta meningkatkan tekad pengabdian "rohaniah dan

4. Meningkatkan dan mendorong upaya masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup lahiriah dan batiniah melalui pendidikan, latihan, dan alih teknologi lainnya sehingga bisa hidup mandiri, berakhlak mulia/budi pekerti luhur, dan mempunyai wawasan luas dalam ilmu pengetahuan dan berbagai aspek kehidupan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Umum ini meliputi:

1. Kegiatan yang menyangkut pembinaan kehidupan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan umum, sosial ekonomi kemasyarakatan, dan bidang pembangunan lainnya.
2. Kegiatan yang menyangkut peranan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai lembaga pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan memberikan peningkatan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan turut serta membangun manusia Indonesia seutuhnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur.

II. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah peningkatan fungsi dan peranan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan dalam ikut mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional di antaranya meliputi:

1. Tercapainya mutu pelaksanaan dan peranserta penyiaran dakwah yang mampu menumbuhkan Ukhuwah Islamiah dan persatuan bangsa.
2. Tercapainya peranan dan kemampuan muballigh, da'i, dan perangkat organisasi lainnya, sehingga lebih mampu berkomunikasi, berpartisipasi, dan mampu membimbing anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam menghayati dan mengamalkan agamanya.

5. Tercapainya kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Menyukseskan Pemilu 1999, Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dan Pembangunan Nasional.

III. KEBIJAKAN PROGRAM UMUM

A. Latar Belakang

Pokok-pokok program LDII merupakan langkah-langkah dan upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan LDII dan ini tertuang di dalam pokok-pokok program yang berdasarkan pengelompokan baik bidang organisasi maupun dengan catur suksesnya. Penyusunan pokok-pokok ini didasarkan pada hasil-hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan program yang telah lalu, tantangan dan kendala yang harus dan akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

Pokok-pokok program ini disusun secara sistematis dan sederhana agar dalam pelaksanaannya mudah dan sesuai dengan kondisi dan potensi LDII yang sangat heterogen (majemuk) baik tingkat pendidikannya, pendapatannya maupun fasilitas, sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. Tantangan, Kendala, dan Peluang

Menjelang akhir abad ke-20 terjadi trasformasi yang mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa di dunia. Keterbukaan hubungan antar bangsa terutama dalam bidang ekonomi dengan masuknya sumber daya asing berupa manajemen, modal, dan teknologi menuntut kemampuan bersaing yang tinggi. Persaingan menuntut perlunya pengetahuan, daya juang, dan etos kerja

global/at, yang dengan mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan serta tidak mengejar ketertinggalan dari bangsa bangsa lain yang telah lebih maju, perlu dipahami berbagai tantangan yang harus dihadapi. Dalam mengatasi tantangan tersebut perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi, baik peluang yang dapat dimanfaatkan maupun kendala yang harus diatasi.

1. Tantangan

Upaya pembangunan peningkatan kualitas SDM diarahkan pada pembangunan manusia sebagai insan dan pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan yang masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan baik secara nasional dan regional maupun global yang berpotensi menjadi tantangan.

Perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu produk pengembangan IPTEK telah menciptakan peluang manusia di bumi mudah melakukan komunikasi dan mengakses informasi. Kondisi ini di samping membuka peluang juga dapat membuka berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia, terutama kualitas akhlaknya.

Di samping itu, pesatnya arus informasi yang tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa, dapat membawa dampak berupa memudarnya semangat kejuangan, idealisme, dan patriotisme dikalangan generasi muda sebagai generasi penerus. Semangat juang yang lemah dapat menimbulkan sikap mudah menyerah, mematikan inisiatif dan kreativitas, serta dapat menghilangkan rasa tanggung jawab. Padahal, kemampuan bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanannya sangat bergantung pada jiwa kejuangan, khususnya dikalangan generasi muda. Oleh karena itu, menumbuhkan idealisme, patriotisme, semangat kejuangan dan kepeloporan dikalangan anak remaja dan pemuda menjadi tantangan yang penting.

Pengaruh budaya luar tidak selalu sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, terutama sebagai akibat dari derasnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, meluasnya penerimaan televisi dari luar, film, dan bahan bacaan yang tidak mungkin seluruhnya dapat disensor sesuai dengan keinginan umat beragama. Semua itu menuntut semakin pentingnya

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memeluk agama yang berbeda-beda, serta memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda pula. Keragaman itu merupakan sumber kekuatan kehidupan kebangsaan Indonesia yang satu. Tetapi, keragaman tersebut juga dapat menjadi potensi kerawanan yang memungkinkan timbulnya perpecahan. Oleh karena itu, berbagai faktor yang dapat menjadi sumber kerawanan itu harus diwaspadai dan dikelola dengan bijaksana dalam rangka Pembangunan Nasional. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan ajaran agama tersebut dapat memperkuat dan memperkokoh nilai dan norma hidup bermasyarakat dan mendukung terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Kendala

Guna menjawab tantangan dalam melaksanakan fungsi dan peran LDII banyak kendala yang dihadapi dan memerlukan penanganan yang tepat dan terarah. Kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung seperti, adanya perilaku yang bertentangan dengan norma-norma ajaran agama serta adanya kekurangmampuan masyarakat memahami, mendalami, dan menghayati serta mengamalkan ajaran dan nilai agama.

Masih melekatnya sikap mental yang sulit melakukan perubahan atau menerima hal baru pada sebagian masyarakat, merupakan salah satu kendala bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah dan mutu tenaga pendidik, ataupun sarana pustaka, sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan gizi, sarana pelayanan sosial dan sarana olah raga, masih belum memadai dan belum secara merata terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kendala lain adalah rendahnya keterampilan, pengetahuan, serta belum berkembangnya lingkungan sosial yang meningkatkan wawasan, etos kerja produktivitas, disiplin, daya kreasi, dan inovasi tenaga kerja.

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering dengan meningkatnya kesadaran penghayatan agama yang mengajarkan nilai-nilai amal shalih dan pengorbanan untuk kebajikan;

b. Meningkatnya kesadaran pentingnya kehidupan keluarga sejahtera bersendikan nilai-nilai agama merupakan peluang yang dapat dikembangkan guna menjadikan masyarakat beragama yang mempunyai kesetiakawanan yang tinggi;

c. Kecenderungan meningkatnya minat masyarakat untuk mempelajari dan mendalami agama;

d. Berkembangnya organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya berlatar belakang keagamaan yang pada umumnya rela beramal dan berperan serta dalam pembangunan;

e. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan, memberi peluang untuk meningkatkan demokrasi, keterbukaan, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, sehingga berhasilnya Pembangunan Nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

f. Kecenderungan meningkatnya peran pelaku ekonomi tingkat menengah dan tingkat bawah, hal ini memberi peluang untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

C. Pedoman

Program ini disusun berpedoman pada:

1. Landasan Kenegaraan yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPR serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Landasan Organisasi yaitu: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta Keputusan MUNAS V LDII.
3. Landasan Keagamaan yaitu: Islam dengan berpedoman Al Qur'an dan Sunnah Rosulullahu Sholallahu Alaihi Wasallam.

1. Mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi negara yang merupakan asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjaga dan memelihara hubungan baik antar sesama umat manusia atas dasar saling hormat menghormati keyakinannya masing-masing, saling harga menghargai sehingga tercipta suasana kerukunan hidup beragama.
3. Menjaga kesucian agama dengan cara mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Al Qur'an dan Sunnah Rosulullahu Sholallahu Alaihi Wasallam, sehingga penyalahgunaan pengertian dan sarana keagamaan dapat dicegah.

IV. POKOK-POKOK PROGRAM

A. Organisasi

1. Konsolidasi organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia:
   a. Pemantapan keanggotaan.
   b. Penataan struktur organisasi di semua tingkat organisasi sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi.
   c. Pemantapan kinerja pembagian tugas dan wewenang serta peningkatan dalam berorganisasi.
2. Kaderisasi dan Pembinaan Mubaligh dan Mubalighot, Da'i, dan Da'iyat:
   a. Mengadakan pendidikan kader Muballigh dan Muballighot, Da'i, dan Da'iyat serta pengurus organisasi. Pada dasarnya setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah pelaku pembangunan.
   b. Membina Mubaligh dan Mubalighot, Da'i, dan Da'iyat yang bermutu dan memiliki wawasan dan integritas luas di bidang ilmu dan penghayatan agamanya, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mandiri, serta memiliki integritas kemasyarakatan.

   c. Memanfaatkan media penerangan lainnya baik media cetak maupun elektronik.
   d. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan serta ukhuwah Islamiah sesama anggota.
   e. Menyebarluaskan syi'ar Islam melalui peringatan hari-hari besar Islam.
4. Hubungan Kemasyarakatan.
   a. Menjalin hubungan dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya berdasarkan AD dan ART serta Peraturan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
   b. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam bidang pembangunan menurut ruang lingkup Program Umum organisasi dan berdasarkan kemampuan masing-masing.
   c. Meningkatkan hubungan baik dengan instansi atau lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah.

B. Pendidikan dan Pembangunan

1. Pendidikan Keagamaan
   a. Memberikan pelajaran agama Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al Qur'an dan Sunnah Rosulullahu Sholallahu Alaihi Wasallam kepada segenap lapisan masyarakat tanpa memandang umur, tingkatan, kedudukan, dan kesukuan dalam usaha mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Meningkatkan pendidikan di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, musholla, dan rumah-rumah sebagai upaya melayani kebutuhan umat Islam dalam pemahaman agama di seluruh pelosok tanah air.
   c. Meningkatkan mutu para Mubaligh dan Mubalighot, Da'i, dan Da'iyat agar mampu menyampaikan ajaran agama Islam kepada berbagai lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

f. Mengadakan pembinaan keagamaan kepada kaum wanita agar dapat mengembangkan peranannya dalam pembangunan selaras dengan tanggung jawab dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sakinah, sehat, dan sejahtera.

g. Menyusun berbagai pola dan metode pendidikan dan dakwah yang dapat diterapkan dalam setiap situasi dan kondisi sosial yang menjadi obyek pendidikan dan dakwah.

2. Pendidikan Umum dan Pelatihan

a. Memberikan kesempatan kepada setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk meningkatkan dirinya melalui pendidikan dan pelatihan, terutama dalam peranserta menanggulangi anggota yang putus sekolah tetapi belum bekerja atau bagi mereka yang mengalami putus hubungan kerja.

b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna terutama kepada generasi muda sehingga kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab, antara lain melalui kegiatan olah raga, bela diri, perkemahan, pendidikan lingkungan hidup, dan sebagainya.

c. Mengusahakan pendidikan dan pelatihan secara khusus tentang budi daya dan teknologi komoditi pangan serta pemanfaatan lahan-lahan tidur, sehingga dapat turut serta dalam penanganan krisis pangan dan pemulihannya.

d. Mengusahakan pendidikan umum/kejuruan dan pelatihan yang menyangkut usaha bersama yang dipusatkan di DPD Tk. II, PC, dan atau PAC.

e. Mengikuti dan atau menyelenggarakan berbagai pertemuan ilmiah, diskusi, seminar, lokakarya, pendidikan umum, dan keterampilan guna memperoleh masukan pemikiran dan konsepsi untuk disumbangkan bagi masyarakat yang memerlukan.

b. Membina budi pekerti yang luhur dan mengembangkan nilai budaya bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan, serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional.

c. Berperanserta dalam mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga dalam rangka membina kesegaran jasmani.

d. Meningkatkan prestasi olah raga melalui upaya pembibitan sedini mungkin dikalangan remaja, pembentukan klub-klub olah raga serta berupaya menyelenggarakan kompetisi secara periodik.

e. Berperanserta dalam upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda, anak, dan remaja sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan turut menciptakan iklim sehat dengan mencanangkan generasi muda, anak, dan remaja berkembang dan bertanggung jawab.

f. Menanamkan kesadaran hidup berwawasan lingkungan dan sehat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

g. Menanamkan sikap kepada generasi muda, anak, dan remaja untuk mencintai dan melestarikan alam lingkungannya serta mengembangkan jiwa patriotisme melalui kegiatan perkemahan-perkemahan, napak tilas, dan lain-lain.

C. Pemberdayaan Potensi LDII

1. Meningkatkan kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Melaksanakan bakti sosial yang dilakukan pada tempat dan waktu tanpa membedakan rasa kesukuan, adat istiadat, kelompok, atau agama.
3. Mewujudkan lembaga pendidikan dan panti asuhan untuk yatim piatu, jompo, orang miskin, dan anak luar biasa.

7. Pendayagunaan dana dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana organisasi serta usaha-usaha produktif yang sesuai dengan fungsi organisasi.
8. Menyelenggarakan tempat-tempat dan pembinaan kegiatan ibadah bagi kelancaran kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
9. Meningkatkan pelaksanaan Panca Darma Wanita dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

D. Peranserta Sosial dan Kemasyarakatan

1. Turut serta mengusahakan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Pembangunan Nasional.
2. Menanamkan kesadaran hidup berwawasan lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya.
3. Berperanserta dalam program pemerintah di bidang kewanitaan sesuai dengan Panca Darma Wanita.
4. Menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui pembinaan kesejahteraan keluarga antara lain: meningkatan gizi keluarga, meningkatkan berbagai keterampilan termasuk memperkenalkan busana muslim.
5. Menyelenggarakan penyuluhan hukum khususnya bagi para anggota melalui kerjasama dengan instansi terkait sehingga turut mempercepat terbentuknya keluarga sadar hukum (KADARKUM).
6. Memberikan bantuan hukum kepada anggota yang memerlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Turut serta dalam penanggulangan krisis ekonomi dan moral serta pemulihannya.
11. Turut meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama dalam rangka mempertinggi dan memperkuat moral serta budi pekerti yang luhur.
12. Menjadikan agama sebagai motivasi penggerak umat beragama dalam Pembangunan Nasional.
13. Turut menanggulangi dampak negatif dari proses modernisasi yang berbentuk kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Mendukung apresiasi dan pengembangan seni budaya dalam segala bentuk dan wujudnya sesuai dengan kepribadian bangsa dan menumbuhkan taqorub kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
15. Responsif dan selektif terhadap berbagai seni budaya yang merusak atau bertentangan dengan ajaran Islam dan kepribadian bangsa.
16. Turut serta mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan proses demokratisasi, keterbukaan, dan adanya pengakuan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).

V. PENUTUP

Pokok-pokok program ini selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan operasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan keseluruhannya merupakan pedoman yang mengikat dan dilaksanakan oleh setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini pada akhirnya tergantung pada partisipasi pimpinan dan seluruh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mengaktualisasikan dirinya untuk membangun masyarakat adil dan makmur,

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,



Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, MSi.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1990/1998

Bismillaahhirohmaanirrohiim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH INDONESIA (LDII)

Menimbang:
a. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pengemban amanat tertinggi organisasi Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban memberi laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya;

b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998 telah memberi laporan pertanggungjawaban pada sidang paripurna MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tangal 24 Oktober 1998;

c. bahwa dipandang perlu memberi tanggapan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut;

d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

2. Keputusan MUNAS V LDII Nomor : 01/KEP/MUNAS-V/LDII/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V LDII 1989.

Memperhatikan: Pandangan Umum pada Permusyawaratan dalam MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998.

Pasal 1

Menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Dewan pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998 yang disampaikan pada sidang paripurna MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 24 Oktober 1998.

Pasal 2

Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998 atas segala amal bakti dan pengabdiannya.

Pasal 3

Naskah laporan tentang pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1990-1998 adalah seperti tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc, Ir. H. P. Sunaryo, M.Si

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamua'alaikaum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Saudara Pimpinan, Peserta MUNAS dan hadirin kami hormati, Pada kesempatan yang sangat bersejarah ini, sesuai dengan jadwal acara MUNAS yang telah ditetapkan adalah saatnya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Namun sebelumnya, izinkanlah terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh Subhanahu Wata'ala bahwasanya atas ridlo dan pertolongan-Nya. Pada hari ini kami selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat berdiri di hadapan sidang Musyawarah Nasional V ini, untuk menyampaikan Pidato Pertanggung Jawaban sebagai memenuhi kewajiban organisasi.

Sesuai dengan Bab IV, Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga LDII, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkewajiban memimpin dan menyelengarakan organisasi tingkat nasional serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Sidang Musyawarah Nasional yang kami hormati,

Sejak Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dipilih dan dilantik menjelang berakhirnya MUBES IV delapan tahun yang lalu, kami sepenuhnya menyadari betapa berat tugas mulia yang kami emban. Tugas mulia tersebut bukan saja merupakan kehormatan dan kepercayaan , akan tetapi sekaligus merupakan tumpuan harapan segenap warga LDII. Oleh karena itu kami menyadari sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, maka pertanyaan kami pada waktu itu adalah: Mampukah kami melaksankan tugas yang teramat luhur ini ? Tentu saja pada saat itu kami hanya bisa menjawab : Insya Allah. Tugas yang namun kemudian pertanyaan itulah yang menjadi motivasi dan sekaligus merupakan tantangan bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk selalu berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Disamping itu, pertanggungjawaban ini dapat kiranya digunakan sebagai bahan masukan bagi MUNAS V ini, untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam mengemban amanat organisasi. Sekaligus sebagai umpan balik (feed back) terhadap segala keputusan yang akan diambil oleh MUNAS V ini, untuk menyusun program organisasi dan penyempurnaan tata laksananya di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban ini merupakan rangkuman dari berbagai kegiatan selama masa bakti 8 tahun, atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia oleh MUBES IV tahun 1990. Pertanggungjawaban ini disajikan dalam bentuk progress report yang bersifat kualitatif yang disusun secara konseptual berpijak pada program umum LDII sebagaimana yang diamanatkan oleh keputusan MUBES IV LEMKARI Nomor: VII/MUBES/ LEMKARI/1990.

Saudara peserta Musyawarah Nasional yang kami hormati,

Diantara berbagai tugas yang diamanatkan MUBES IV tahun 1990, ada tiga hal pokok yang menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yaitu:

- Konsolidasi organisasi;
- Pembinaan dan pengembangan pendidikan dakwah; dan
- Peran serta LDII dalam Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan mekanisme kerja organisasi dan skala prioritas pelaksanaan tugas, maka langkah awal yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah mengkonsolidasikan segenap jajaran pada semua tingkat kepengurusan LDII yang ada. Konsolidasi organisasi ini mempunyai tujuan yang strategis sifatnya yaitu dalam rangka penyusunan dan penataan kembali struktur organisasi, komposisi dan personalia kepengurusan sebagaimana yang diamanatkan olen MUBES IV Nomor: IV/MUBES/LEMKARI/1990, untuk menuju kesempurnaan dan kemandirian

perubahan nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan perubahan AD & ART organisasi, maka dalam waktu kurang dari dua tahun saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, telah diselesaikan perubahan nama organisasi, penyesuaian struktur organisasi dan personalia, secara bertahap mulai dari struktur organisasi tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan di seluruh Indonesia.

Saudara sekalian yang kami hormati.

Sukses dari awal kelembagaan ini, merupakan modal dasar bagi pengembangan organisasi, dan sekaligus semakin mempertebal keyakinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk dapat meraih sukses-sukses berikut.

Demikianlah secara nasional kegiatan konsolidasi ini tidak pernah berhenti dalam arti, suatu usaha dan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus, terencana, terarah dan terpadu untuk mencapai hasil yang telah disepakati bersama.

Pada masa bakti kepengurusan ini telah dilaksanakan tiga kali Rapat Kerja Nasional, yang merupakan rapat satu tingkat di bawah MUNAS. Rakernas ini bertujuaan untuk mengevaluasi hasil kerja organisasi. Juga dimaksudkan untuk memberi respon terhadap setiap program-program pembangunan nasional yang diagendakan pada saat ini.

RAKERNAS I diselenggarakan pada tanggal 14-15 Desember 1991, yang diikuti oleh unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, utusan DPD TK. I dan utusan DPD TK. II seluruh Indonesia. Dalam Rakernas I 1991 ini ditetapkan 5 keputusan yaitu:

1. Keputusan tentang Pokok-pokok Prioritas Program LDII;
2. Keputusan tentang Juklak MUSDA Tk. I dan Tk. II LDII;
3. Keputusan tentang MUSCAB dan MUSACAB;
4. Keputusan tentang Pondok Pesantren LDII; dan
5. Keputusan tentang Pernyataan RAKERNAS.

RAKERNAS II diselenggarakan pada tanggal 12-13 September 1994, yang diikuti oleh Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam

Keputusan RAKERNAS III tahun 1996 tersebut yaitu :

1. Keputusan tentang Pokok-pokok Prioritas Program LDII;
2. Keputusan tentang Pernyataan RAKERNAS; dan
3. Keputusan tentang Pengisian Lowongan Kepengurusan Antar waktu DPP LDII.

Dari keputusan-keputusan yang ditetapkan pada setiap RAKERNAS, kami ingin menyampaikan ulasan dan penekanan terhadap dua keputusan dari sebuah Rekomendasi yaitu:

1. Keputusan tentang Prinsip-prinsip Dakwah LDII;
2. Keputusan tentang Pengisian Lowongan Kepengurusan Antar waktu; dan
3. Rekomendasi dari utusan DPD Tk. I LDII seluruh Indonesia kepada DPP LDII masa bakti 1990-1995 pada RAKERNAS III LDII 1996.

Bahwa untuk mengefektifkan fungsi dakwah yang merupakan fungsi LDII sentral juga dalam rangka peransertanya seluruh anggota LDII mewujudkan cita-cita pembangunan negara dan bangsa, dipandang perlu untuk memberikan pedoman yang mengikat seluruh anggota LDII untuk melaksanakan kegiatan dakwahnya. Prinsip-prinsip dakwah LDII ini, disamping sebagai pedoman yang mengikat seluruh warga LDII, sekaligus sebagai batasan bahwa kegiatan dakwah yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah LDII berada di luar tanggung jawab organisasi.

Saudara peserta MUNAS yang kami hormati,

Perlu kami laporkan bahwa masa bakti kepengurusan kami adalah tahun 1990-1995. Namun oleh karena beberapa hal, yaitu:

Pertama : bahwa pada masa akhir kepengurusan 1995 organisasi LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas

Kedua : Pada RAKERNAS III tahun 1996 seluruh utusan dari DPD Tk. I menyepakati dan tetap melaksanakan tugas sampai dengan MUNAS V dapat dilaksanakan. Atas dasar dua alasan tersebut di atas, maka baru saat ini DPP LDII malaksanakan MUNAS V.

Saudara peserta MUNAS yang kami hormati,

Kiranya perlu kami laporkan bahwa pada masa bakti kepengurusan kami, ada 5 orang dari unsur pimpinan telah pulang kerahmatulloh, yang berarti tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban organisasi. Oleh karena itu dalam RAKERNAS III 1996 telah ditetapkan keputusan pengisian lowongan kepengurusan antar waktu, yaitu :

1. KH. Suyadi Gitohardjo, Jabatan Ketua Dewan Pembina diganti oleh Letkol. (Purn) H. Hasan Bishri;
2. KH. Nur Ali Mubarok, Jabatan Dewan Pembina, diganti oleh H. Soetojo Wiryo Atmodjo, SH;
3. H. Syamsudin Zahar, SE. Jabatan Sekjen, diganti oleh H. Ahmad Alfurqon, BA;
4. H. Herman Jaya, Jabatan Dep. Penbitmassmed, diganti oleh Ir. Rathoyo Rasydan, MBA;
5. Ny. Hj. Andi Azis, Jabatan Dep, Peranan Wanita, diganti oleh Ny. Hj. Heidi Soeharno, SH; dan
6. Pergantian yang dikarenakan perpindahan, yaitu M. Chanafi, SH. Jabatan Dep. Hukum, diganti oleh Ir. H. Soeharno.

Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mengangkat kedua belah tangan memohon do'a kepada Alloh SWT mudah-mudahan arwah mereka mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahnya.

Saudara-saudara peserta MUNAS yang kami hormati,

Selain konsolidasi organisasi yang telah kami laporkan yang menjadi perhatian DPP LDII program selanjutnya adalah program pembinaan dan pengembangan

penyelenggara pondok pesantren maupun kepada semua warga LDII. Dari hasil pemantauan DPP LDII ke daerah-daerah dan dari laporan DPD Tk. I seluruh Indonesia menunjukkan kehidupan keagamaan baik di pondok-pondok pesantren maupun di majlis-majlis ta'lim yang tersebar di seluruh pelosok tanah air berkembang semakin pesat dan semarak. Hal ini terlaksana antara lain karena disamping tersedianya tenaga-tenaga pangajar dan mubaligh-mubalighot yang semakin memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, juga komponen-komponen lain yang semakin mendukung terciptanya iklim dakwah yang kondusif, menyejukkan dan mengakomodir serta menjawab setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Saudara-saudara peserta MUNAS yang kami hormati,

Khusus untuk generasi muda, program pembinaan ini juga mencakup Peningkatan prestasi olah raga. Sebagaimana kita ketahui, dalam kurun masa bakti kami, telah diselenggarakan tiga kali turnamen sepakbola tingkat nasional yaitu:

Pada bulan Oktober 1991
Pada bulan Oktober 1994
Pada bulan Oktober 1996

Semuanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Suatu event penting yang mempunyai momentum terhadap setiap usaha pembinaan generasi muda di Indonesia.

Di bidang Pendidikan Kemasyarakatan, juga tidak terlepas dari jangkauan program pembinaan ini, antara lain meliputi penyelenggaraan kursus-kursus keorganisasian, keterampilan, Penataran P4, Penataran Wawasan Kebangsaan dan Kegiatan Perkemahan Pemuda. Untuk praktisnya, kegiatan-kegiatan

Pembangunan Nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan bagian dari keseluruhan bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat terhadap segala sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa, dan segala sesuatu yang menjadi keprihatinan bangsa. Oleh karena itu dalam ikut serta berupaya keluar dari situasi krisis yang melanda negara dan bengsa kita ini DPP LDII menyerukan kepada segenap warga LDII di seluruh pelosok tanah air untuk :

1. Selalu tegar, tabah dan tahan uji dalam menghadapi masa krisis dengan selalu berdo'a dan tawakal kepada Allah, serta selalu bersikap dan bertindak terpuji, positif, hemat, bekerja keras selalu produktif.
2. Agar selalu bersikap waspada dan tidak mudah terpengaruh dan terpancing terhadap hasutan-hasutan yang menjurus kepada perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai hak asasi manusia, serta menjurus perbuatan yang anarkis, dan mendukung program reformasi yang dilaksanakan secara damai, bertahap dan konstitusional.
3. Agar segera merintis dan melaksanakan kegiatan ekonomi dalam bentuk koperasi atau usaha bersama lainnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembinaan serta pengembangan pendidikan dan dakwah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap usaha mempercepat tercapainya tujuan Nasional yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, kalau boleh kami sampaikan, inilah wujud peran serta LDII dalam Pembangunan Nasional. Dengan kesim-pulan ini, maka prioritas pelaksanaan program berikutnya yaitu peran serta LDII dalam Pembangunan Nasional sudah terwujud.

ini merupakan hasil akhir dari suatu proses pelaksanaan tugas, dimana di dalamnya terdapat ujian dan hambatan. Suatu tugas dikatakan berhasil apabila ujian dapat dilampaui dan hambatan dapat teratasi. Jadi kalau dalam laporan itu tertulis "berhasil" berarti harus dibaca " hambatan sudah teratasi". Karena sudah dapat teratasi maka tidak perlu lagi kami uraikan lebih lanjut.

Namun demikian adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas itu, itu tetap menjadi catatan DPP LDII, dan menjadi pelajaran yang berharga untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Saudara-saudara peserta Musyawarah Nasional yang kami hormati,

Akhirnya, sampailah uraian kami pada pelaksanaan tugas terakhir DPP LDII periode 1990-1998, yaitu mempersiapkan penyelengaraan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Untuk menyukseskan MUNAS V ini, jauh-jauh hari sebelumnya DPP LDII telah mempersiapkan penyelengaraan acara tersebut, begitu juga rancangan-rancangan keputusan yang akan diambil, diantaranya adalah: rancangan tata tertib dan rancangan jadual acara MUNAS V, yang tadi telah disahkan.

Bagi DPP LDII, keberhasilan penyelengaraan MUNAS V ini, merupakan kebanggaan tersendiri, karena terselengaranya MUNAS V ini, berarti perjalanan masa bakti 8 tahun telah kami lampaui dengan selamat.Tidak ada ungkapan lain yang kami sampaikan pada akhir masa bakti ini, kecuali ucapan syukur serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah dan segenap jajaran pengurus serta warga LDII, yang karena dorongan dan dukungannya, maka semua tugas-tugas dapat kami laksanakan dengan baik.

Begitu juga, kepada yang kami hormati Dewan Pembina LDII yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan, kami atas nama segenap pengurus DPP LDII mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Kami menyadari bahwa, sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Maka apabila selama ini kami memimpin organisasi yang kita cintai

tampil saat ini dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Jumlah DPD Tk. I LDII : 27 Provinsi
2. Jumlah DPP Tk. II LDII : 245 Kabupaten/Kodya
3. Jumlah PC LDII : 1462 Kecamatan
4. Jumlah PAC LDII : 2942 Desa/Kelurahan

Adapun jika dibandingkan pada awal periode kepengurusan hasil MUBES IV, maka perkembangan jumlah DPD yaitu:

1. Jumlah DPD Tk. I LDII : 26 Provinsi
2. Jumlah DPP Tk. II LDII : 238 Kabupaten/Kodya
3. Jumlah PC LDII : 1352 Kecamatan
4. Jumlah PAC LDII : 2803 Desa/Kelurahan

Dari data tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan pada periode kepengurusan yang akan datang akan berkembang lebih pesat lagi.

Demikian uraian pertanggung jawaban DPP LDII masa bakti 1990-1998 ini untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang MUNAS V untuk menilainya.

Sekian, semoga Allah yang Maha Kuasa sentiasa melimpahkan berkahNya kepada kita sekalian.

Wassalamu`alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta 24 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

H. Hartono Slamet
Ketua Umum

PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM
DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1998-2003

Bismillahirrohmaanirrohiim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang : a. bahwa MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan komposisi Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003;

b. bahwa untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih saudara DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, MSc sebagai Ketua Umum dan Saudara H.R. Sunaryo, SH, MM sebagai Sekretaris Jenderal masa bakti 1998-2003.

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu keputusan MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang pemilihan langsug Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003.

Mengingat : 1. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 01/KEP/MUNAS-V/LDII/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tantang Peraturan Tata Tertib MUNAS V LDII.

2. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 03/KEP/MUNAS-V/LDII/X/1998 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

3. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 04/KEP/MUNAS-V/LDII/X/1998 tentang Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1998-2003

Pasal 1

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 1998-2003 adalah seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP LDII terpilih untuk menyusun Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LDII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, M.Si

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1998-2003

I. KETUA UMUM : DR. Ir. K.H. ABDULLAH SYAM, MSc
II. SEKRETARIS JENDERAL : H.R. SUNARYO, SH, MM

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LDII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, M.Si

Bismillahirrohmaanirrohiim

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang : a. bahwa MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003;

b. bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagaimana termasuk dalam huruf (a) telah berhasil melaksanakan tugasnya menyusun komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003;

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang komposisi dan personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003;

Mengingat : 1. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 01/KEP/MUNAS-V/LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS V LDII.

2. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 03/KEP/MUNAS-V/LDII/1998 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

3. Keputusan MUNAS-V LDII Nomor 04/KEP/MUNAS-V/LDII/1998 tentang Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MUNAS V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 1998-2003.

Pasal 1

Komposisi dan personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998-2003 adalah seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Masa Bakti Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat adalah lima tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, M.Si.

DEWAN PENASIHAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1998-2003

Ketua	:	H.R. Edy Masiadi
Wakil Ketua	:	Drs. H. Ahmad Suarno, MBA
Wakil Ketua	:	H. Hasan Bishri
Sekretaris	:	H. Ahmad Alfurqon, BA
Anggota	:	K.H. Hartono Slamet
Anggota	:	R.H. Sanusi Kurnaen Rasyidi, SH
Anggota	:	K.H. Kasmudi Assidiqi
Anggota	:	Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc
Anggota	:	Dr. H. Subarno Kartawinata
Anggota	:	H. Andi Amier Hamzah, SSP

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BHAKTI 1998-2003

Ketua umum	:	DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, MSc
Ketua	:	K.H. Dawud Sri Nur Hidayat
Ketua	:	H. Zubaidi Umar, SH
Ketua	:	Ir. H.P. Sunaryo, Msi
Ketua	:	H. Ahmad Kuntjoro, SE,MBA
Ketua	:	H. Soehartono Rijadi, MBA
Ketua	:	Ir. H. Teddy Suratmadji, MSc
Ketua	:	Ir. H. Zainal Asyikin Abbas
Ketua	:	DR. H. Bambang Kusumanto, MSc
Sekretaris Jenderal	:	H.R. Sunaryo, SH, MM
Wakil Sekjen	:	Ir. H. Rhatoyo Rasdan, MBA
Wakil Sekjen	:	Drs. H. Bambang Sukamto, SE, MM
Bendahara	:	Drs. H. Elmursil, Ak
Wakil Bendahara	:	H. Abubakar Sidiq, BSc
Wakil Bendahara	:	Drs. H. Deddy Supriadi, Ak, MM

7. H. Dody Yusuf Ridwan, SE
8. Ir. H. Achyar Nazaruddin, MBA

II. DEPARTEMEN PENDIDIKAN AGAMA DAN DAKWAH

1. Drs. K.H. Aceng Karimulloh
2. K.H. Eryanto Sulistiawan, SH
3. Ir. K.H. Asy'ari Akbar, MM
4. Drs. K.H. M. Thoyibun
5. Drs. H. Maryo Muin Saputro
6. K.H. Mauluddin Akhyar Hafidz
7. Drs. H. Buwono
8. Erman Zufari, SH

III. DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM DAN PELATIHAN

1. Drs. H. Ghozali
2. Drs. H. Bambang Pumomo, MBA, MM
3. Drs. H. Bambang Aji Pitaya
4. Drs. H. Djadja Supardja
5. Drs. H. Ahmad Djamhuri

IV. DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Drs. H. Ibrahim Guril, MZ
2. Ir. H. Rajab Tampubolon
3. Ir. H. Abubakar B.R. Natakusuma
4. Ir. H. Basah Hernowo, MBA
5. H. Sukardie S. Embran
6. H. Agus Priyanto, SE
7. H. Semoga Jaya, MS. BcKU

8. H. Wira Supardi, SE
9. H. Ramidi Rogojampi

VI. DEPARTEMEN PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Drs. H. Hidayat N. Rasul
2. Drs. H. Khairul Mukhsim
3. Drs. H. Iskandar Siregar
4. Ir. H. Edi Supriyadi
5. Drs. H. Bustanudin
6. H. Agus Mundjahit
7. Drs. H. Suprapto
8. Drs. H. Bahrudin

VII. DEPARTEMEN KOPERASI, WIRAUSAHA DAN TENAGA KERJA

1. H. Azhar Budiman, SE
2. H. Kuncoro Hendratmo, SE, MBA
3. H. M. Taufik Darmansyah, SE
4. Ir. H. Iwan Agus Setiawan Wibowo
5. H. Rahmatullah, SE, MBA
6. Ir. H. Irvan Jusuf
7. H. Bahrun Idris, SE
8. Ir. H. Aditiyo Handoko, MM
9. H. Muhammad Ied, SE
10. Ir. H. Prasetyo Seno, MSc

VIII. DEPARTEMEN PERANAN WANITA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Dra. Hj. Sri Tutini Sanusi
2. Dra. Hj. Amarina Ariyanto
3. Dra. Hj. Erna Harnaeni Supardja
4. Hj. Uswatun Harsono
5. Hj. Nur Hanifah, Sm.K
6. Hj. Pretty D. Padmono

6. Ir. H. Muhtadi
7. Drs. Edi Sulamo
8. Drs. H. Buchari E. Setiaputra

X. DEPARTEMEN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

1. H. Sunoto, SH
2. H. Syamsuri, SH
3. H. Rahmadi, SH
4. Drs. H. Dedi Slamet, SH. MH.
5. Raharno, SH
6. Supriasto, SH
7. Harimurti, SH
8. Hj. Heidy Suharno, SH, CN
9. Hj. Ati Indriati Rasyid, SH, CN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 1998

MUSYAWARAH NASIONAL V
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua, Sekretaris,

MUSYAWARAH NASIONAL V LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA JAKARTA, 24 OKTOBER 1998

Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc. Ir. H.P. Sunaryo, M.Si

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد

يا ذاالجلال والاكرام ٣ x

Ya Allah ya Tuhan kami,
Maha Suci Allah yang Maha Esa Pencipta alam semesta
segala sesuatu berlaku atas kodrat-Mu, tiada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizinMu.

Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa

Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Oktober 1998, kami yang berkumpul di tempat ini akan melaksanakan acara MUNAS V LDII sebagai Lembaga Tertinggi Organisasi, oleh karena itu berikanlah kepada kami pertolongan, keamanan, keselamatan, kelancaran,kebarokahan serta bimbingan dan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah ya Allah segala yang kami lakukan dalam kegiatan ini sebagai amal ibadah disisi-Mu.

Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui,

Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya.

Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa,

Karuniakanlah kami dan generasi muda kami tekad, ketabahan dan keuletan dalam berjuang menghadapi krisis yang menimpa bangsa dan negara kami. Berikanlah petunjuk kepada kami dan para pemimpin kami jalan yang lurus dan benar dalam mengantarkan bangsa kami menuju kehidupan yang engkau ridloi. Kokohkanlah kesatuan dan persatuan bangsa dan jauhkanlah dari godaan, gangguan dan pengacauan yang akan membawa kc dalam perpecahan kerun-tuhan dan kehancuran bangsa.

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ * وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ * وَبَارِكْ لَنَا فِي اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ * وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْنَ لَهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا * اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَا اَعْطَيْتَنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ * اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً، اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي اجْتِمَاعِنَا

Ya Allah ya Tuhan kami,

Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Esa Pencipta alam semesta, segala sesuatu berlaku atas kodratMu, tiada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizinMu.

Ya Allah Tuhan yang Maha Memberi,

Betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami tidak mampu menghitungnya. Dan berkat nikmat Mu lah berhasil melaksanakan MUNAS V LDII dengan aman, selamat, lancar dan barokah, sehingga kami yang hadir disini bersama-sama memanjatkan syukur kepadaMu.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Besar,

Dengan berakhirnya MUNAS V LDII ini kami mohon kepadaMu agar segala sesuatu yang telah kami putuskan di dalam MUNAS ini dapat menjadi manfaat dan barokah bagi organisasi kami sebagai sarana kelancaran ibadah kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berikanlah kepada pengurus yang baru dilantik kekuatan, kemampuan, keuletan, ketabahan, serta kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dan bimbinglah mereka ke jalan yang Engkau ridloi.

Ya Tuhan yang Maha Pengasih,

Masukanlah kami ke dalam golongan hambaMu yang taat kepadaMu dan berkati kepada agama, nusa, bangsa dan negara kami.

Dan berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesyukuran, keamanan, keselamatan, kelancaran serta rejeki yang halal dan barokah dan hindarkanlah kami dari nestapa dan duka, sehingga kami selalu tentram dalam melaksanakan tugas serta jauhkanlah kami dari perbuatan tercela.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 1998 di Jakarta;

b. bahwa untuk menunjang agar Musyawarah Nasional tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses diperlukan suatu keputusan tentang Panitia penyelenggara Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia 1998;

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan tentang Panitia Musyawarah Nasional V LDII 1998.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.
3. Keputusan DPP LDII Nomor : 111/KEP/DPP LDII/ VIII/1998 tanggal 10 Agustus 1998 tentang Musyawarah Nasional V LDII 1998.

Memperhatikan: Hasil Musyawarah dan rapat-rapat DPP LDII tentang Panitia Musyawarah Nasional V LDII 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL V LDII 1998.

Pasal 3

Panitia pengarah dan panitia pelaksanan bertanggung jawab kepada DPP LDII

Pasal 4

Komposisi dan personalia panitia pengarah dan panitia pelaksana MUNAS adalah seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini bila dipandang perlu dapat diatur selanjutnya oleh DPP LDII.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua Umum,

H. Hartono Slamet

Sekretaris Jenderal,

H. Ahmad Alfurqon

I SC (PENGARAH) : Ketua : Drs. H. Ahmad Buamo, MBA
Sekretaris : H. Ahmad Alfurqon

Anggota-anggota:

a) Organisasi:

1. Dr. H. Subarno Kartawinata
2. H. Hartono Slamet
3. Ir. H. P. Sunaryo, Msi
4. H. Zubaidi Umar, SH
5. Drs. Catur Triharyono
6. Drs. H. Guril IbrahimMZ
7. Dra. Hj. Sri Tutini Sanusi

b) Program Umum :

1. H. Hasan Bishri
2. Ir. H. Abdurrohman Sidiq, ME
3. DR. Ir. H. Abdullah Syam, MSc
4. Ir. H. Abusyaifan Abdul Jabbar Karim, MSc
5. DR. H. Amir Musadad
6. Ir. H. Teddy Suratmadji, MSc
7. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA

c) Perubahan AD/ART

1. R. H. Sanusi Kurnaen Rasyidi, SH
2. H. R. Edy Masiadi
3. H. R. Sunaryo, SH, MM
4. H. Sunoto, SH
5. H. Syamsuri, SH
6. H. Ahmad Kuncoro, SE, MBA
7. Drs. H. Bambang Sukamto, SE, MM

Anjuran Penghubung

1. Drs. H. Bambang Purnomo, MBA
2. H. Semoga Jaya, MS, BcKU
3. H. Agus Priyanto, SE

III. SEKSI-SEKSI

A. PROTOKOL

Ketua :

1. Drs. H. Ghozali MFS
2. Drs. H. Kais Ilyas
3. H. Rustiono
4. Ir. H. Abubakar B.R. Natakusuma, MM
5. H. Roni Harahap

Anggota-anggota :

1. H. Sutarjo
2. H. Dedi Supriadi, AK, MM
3. Drs. H. Indradyo Saputro
4. Drs. H. Sumiswondo
5. Drs. H. Ambardi
6. H. Akmal Yatim
7. Drs. H. Undang Saeli
8. Drs. H. Sunarto, MM, MBA
9. Drs. H. Sachrin, BcIE
10. H.M. Rokib Al-Arif
11. H. Andi Lala
12. H. Didi Petet
13. H. Keenan Nasution

4. H. Wira Supardi, SE
5. H. Muhammad Ied, SE
6. Ir. H. Syamsudar
7. Mujiyarto K, S. Com.
8. Bambang Setiawan, SH
9. H. Suparno Yahya
10. Hermawan Sm.
11. Heri Kurniadi
12. H. Abdul Fatah
13. Mun. M. Madinarovah
14. Majinur Ahmad
15. Sutarno
16. M. Ridwan
17. Yahdianto
18. Guntoro Zarkasih

C. DOKUMENTASI

1. Drs. H. Hidayat N.R - Pers
2. H. Ramidi Rogojampi - Foto
3. H. Agus Munjahit - Studio
4. H. Abdullah Usman (Fuji Film) - Foto
5. Santoso TVRI - Broadcast
6. Suyadi S - Video
7. Crew Video - Video

D. PERLENGKAPAN

1. Drs. H. Nano Tisno Wardono (Ketua)
2. H. Kuswanto
3. H. Edy Suryadi
4. Sacful

4. H. Fraveto
5. H. Sapto Sutarso
6. H. Henry Cahyoko, SE.
7. H. Suratman
8. H. Ramdana
9. H. Daldiri Ariyanto, SA.
10. Sampurno
11. Imam Bukhori
12. Lutfi

F. KEAMANAN

1. Letkol (Purn) H. Abdul Rajab
2. H. Sutiman Jaya
3. Kapt. Pol. H. Sarjono
4. Letda. Pol. Supriyono
5. H. Sutoyo
6. H. Kusno Dodi
7. Harmono
8. Suryo Perwiro Utomo
9. Roni Hermawan
10. Rizal Fahmi
11. Supriyatna
12. Balongan, MM
13. Supardi
14. Ascp Saifudin
15. Muh. Qomari
16. Qomari
17. Zamzam

G. DEKORASI

1. Ir. H. Arif Wahyudi
2. Drs. Panji
3. Ir. Agus Supriyadi
4. H. Agus Tavip Herlambang
5. Satiman
6. Ahmad Reza
7. Joko Tanto Sutopo
8. M. Thoha

H. KESEHATAN

1. dr. H. Agus Sudrajad
2. H. Suhardi
3. Mad Subli
4. Dede Suhendi
5. H. Muhidin
6. Subekti

I. KONSUMSI

1. H. Apip Permana
2. H. Waloeyo Sejati
3. H. Sodiqin
4. H. Alimin
5. H. Poniman
6. H. Abdul Malik
7. H. Ahmad Asmuni
8. H. Agus Fairi

17. Ny. Hj. Alfurqon
18. Ny. Hj. Andi Amier
19. Ny. Hj. Apip Permana
20. Ny. Hj. Syamsudin
21. Ny. Hj. Sudarko
22. Ny. Hj. Subandi
23. Ny. Hj. Oka Sukendar
24. Ny. Hj. Waluyo Sejati
25. Ny. Hj. Alimin
26. Ny. Hj. Lilik Temu Wiryo Sumarto

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua Umum,

H. Hartono Slamet

Sekretaris Jenderal,

H. Ahmad Alfurqon

2. Tema MUNAS: Dengan MUNAS V Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 1998 kita Tingkatkan Kualitas SDM Dalam Menyikapi Era Globalisasi.

II. WAKTU DAN TEMPAT

MUNAS Lembaga Dakwah Islam Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tangal 24 Oktober 1998 , bertempat di Gedung Wisma Haji Pondok Gede Jakarta.

III. PANDAFTARAN PESERTA

1. Setiap Peserta MUNAS Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara dengan menyerahkan surat penunjukkan dari DPP LDII dan atau surat mandat dari DPD Tk. I atau DPD Tk. II LDII pada : Sekretaris MUNAS LDII 1998, di Jl. Tawakal IX No. 13-15 Jakarta Barat Telp : (021) 5682232-5605851.
2. Setiap peserta MUNAS LDII berhak mendapatkan bahan-bahan sebagai berikut:
   a. rancangan Keputusan : a. Organisasi, b. Perubahan AD/ART LDII/Program Umum, Pedoman Tata Tertib dan Susunan Acara MUNAS V LDII 1998;
   b. tanda peserta;
   c. buku absensi; dan
   d. blok note dan balpoin.

IV. PAKAIAN

1. Pada acara pembukaan dan penutupan MUNAS V LDII, peserta diwajibkan memakai pakaian yang ditentukan, dan identitas LDII.
2. Selama menghadiri sidang-sidang MUNAS V LDII, pakaian bebas rapi dengan memakai tanda peserta MUNAS V LDII.

VI. PEMBAGIAN KOMISI

1. MUNAS V LDII terdiri dari komisi A, B dan C
2. Setiap peserta wajib menjadi salah satu anggota komisi tersebut.

VII. LAIN-LAIN

1. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan MUNAS V LDII.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur kemudian oleh Panitia MUNAS V LDII 1998.

Jakarta, 23 Oktober 1998

PANITIA PELAKSANA
MUSYAWARAH NASIONAL V LDII 1998

Ketua,	Sekretaris,
K.H. Dawud Sri Nur Hidayat	H. Andi Amier Hamzah, SSP

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

No. Pol. : STTP / PMM-3 / 480 / X / 98 / DIT IPP

1. Telah terima surat dari : --DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
2. Nomor Surat : - 071/SUM/DPP LDII/IX/1998.
3. Tanggal Surat : - 28 September 1998.
4. Perihal : - Musyawarah Nasional V pada tanggal 24 Oktober 1998 di Asrama Haji Pondok - Gede Jakarta Timur, peserta ± 500 orang.
5. Alamat / Telephone : - Jl. Tawakal IX No. 13 - 15 Jakarta Telp. 5682232.
6. Pemberitahuan telah memuat keterangan tentang :
   a. Identitas Penyelenggara (Organisasi / Badan Hukum / Perorangan).
   b. Bentuk kegiatan.
   c. Maksud dan tujuan kegiatan.
   d. Tanggal / waktu kegiatan

/ e. Tempat .....

j. Kesanggupan penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Surat izin dari pemilik tempat kegiatan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 1998

A.n. DIREKTUR INTELIJEN DAN PENGAMANAN POLRI
KEPALA SUB DIREKTORAT PAMMAS

DRS. C. N. PATTY
KOLONEL POLISI NRP. 50110147

Tembusan :

1. Sekjen Depag RI.
2. Dirjen Sospol Depdagri.
3. Dir Intelpam Polri.
4. Kapolda Metro Jaya
   Up. Kadit IPP.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, sebagaimana diamanatkan MUNAS V LDII 1998 diperlukan koordinasi pembidangan dan pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi LDII;

b. bahwa pembidangan dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kegiatan dan struktur organisasi oleh pengurus harian DPP LDII perlu dipertegas agar dicapai pengorganisasian yang berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu keputusan DPP LDII tentang Penanggung Jawab Pembidangan dan Pembinaan Departemen-departemen di lingkungan DPP LDII.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDIII.
4. Program Umum LDII
5. Hasil Keputusan MUNAS V LDII 1998

Pasal 1

Komposisi Penanggung Jawab struktur pembidangan dan pembinaan Departemen-departemen organisasi LDII adalah seperti tersebut dalam lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab pembidangan dan pembinaan departemen-departemen organisasi LDII diatur lebih lanjut dalam uraian tugas kepengurusan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Umum DPP LDII.

Pasal 3

(1) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

DR. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.

Sekretaris Jenderal,

H.R. Sunaryo, SH, MM.

Ketua Umum :
Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam MSc

Ketua-ketua Bidang Pembina Departemen:

1. K.H. Dawud Sri Nurhidayat
   Membidangi : Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah
2. H. Zubaidi Umar, SH
   Membidangi : Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum
3. Ir. H.P. Sunaryo M.Si.
   Membidangi : Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
4. H.M. Soehartono Rijadi,MBA
   Membidangi : Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Departemen Penerangan dan Media Masa
5. Dr. H. Bambang Kusumanto MSc
   Membidangi : Departemen Koperasi, Wirausaha dan Tenaga Kerja
6. H. Akhmad Kuntjoro, SE, MBA
   Membidangi : Departemen Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya
7. Ir. H. Teddy Suratmadji, MSc
   Membidangi : Departemen Litbang, IPTEK dan Lingkungan Hidup; dan Departemen Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga
8. Ir. H. Zainal Asyikin Abbas
   Membidangi : Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan

Penanggung Jawab dan Koordinator Pembinaan Pelaksanaan CATUR SUKSES LDII

Bidang Peningkatan Kinerja Organisasi
Ir. H.P. Sunaryo, Msi

Terdiri dari :
- Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
- Departemen Hubungan Antar Lembaga
- Departemen Penerangan dan Media Massa

Bidang Pemberdayaan Potensi LDII

DR. H. Bambang Kusumanto, MSc

Terdiri dari : - Departemen Koperasi, Wira Usaha dan Tenaga Kerja
- Departemen Litbang, IPTEK dan Lingkungan Hidup
- Departemen Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Peran Serta Sosial dan Kemasyarakatan

H. Zubaidi Umar, SH
Ir. H. Zainal Asyikin Abbas
Yaitu : - Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum

Sekretaris Jenderal

H.R. Sunaryo, SH. MM.

Wakil Sekretaris Jenderal

1. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA
   Membantu Sekretaris Jenderal dalam kegiatan:
   a. Bidang Pendidikan dan Pembangunan
   b. Bidang Pemberdayaan Potensi LDII
2. Drs. H. Bambang Sukamto, SE, MM
   Membantu Sekretaris Jenderal dalam kegiatan:
   a. Bidang Peningkatan Kinerja Organisasi
   b. Bidang Peran Serta Sosial dan Kemasyarakatan

Bendahara Umum

Drs. H. Elmursil, Ak

Sekretaris DPP LDII

Kepala Sekretariat:

H. Syamsuri, SH

Anggota : 1. Drs. Harri Drajat Bhakti
2. Dwi, Bc, Ak
3. Mujiyarto. K, S. Kom
4. Abdul Majid
5. H. Suparno Yahya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 1998

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Ketua Umum,

Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, MSc

Sekretaris Jenderal,

H. R. Sunaryo, SH, MM

3.	Drs. H. A. Busano, MBA	Wakil Ketua	Jl. Fajar Baru III/14 Cengkareng Jakarta Barat Telp. 6197182
3.	H.M. Hasan Bishri	Wakil Ketua	Jl. Bambu Apus No.1-B Komplek Baitul Karim Ciputat Telp. 7400593
4.	H.A. Alfurqon	Sekretaris	Jl Taman Makam Pahlawan Taruna No.354 Kodya Tangerang Telp. 5513031
5.	K.H. Hartono Slamet	Anggota	Jl. Gurame VII/222 Depok Jawa Barat Telp. 7521103
6.	R.H. Sanusi Kurnaen Rasyidi, S.H.	Anggota	Jl. Saturnus Selatan I/1 Margahayu Raya Blok H/69 Telp. (022) 7562656 Bandung - Jawa Barat
7.	K.H. Kasmudi Assiddiqi	Anggota	Jl. Raya Romo No. 8 Manyar Gresik Telp. 982082 Jawa Timur
8.	Ir. H. Abusyaifan A. Jabar Karim, M.Sc.	Anggota	Jl. Merak III Blok N-3/9 Bintaro Jaya Telp. 7353373 Jakarta Selatan
9.	Dr. H. Subarno Kartawinata	Anggota	Perum Cirebon Permai V/22 Telp. (0231) 205146 Cirebon - Jawa Barat
10.	H. Andi Amier Hamzah, S.Sp.	Anggota	Perumahan Cipayung Indah Jl. Raya Cipayung Blok R 1 No. 18 Telp. 8447443 Jakarta Timur

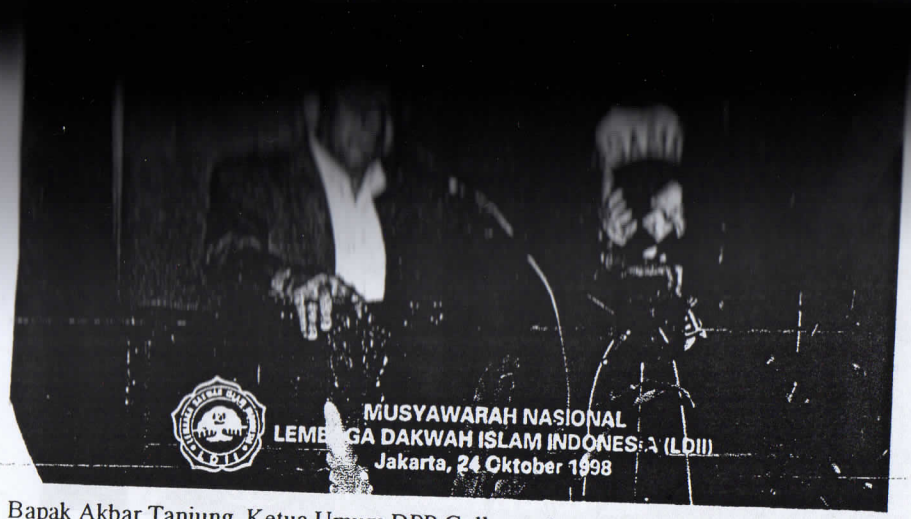
2.	K.H. Dawud Sri Nur Hidayat	Ketua	Jl. Enim No 112 (104) Tanjung Priok Telp. 4300283-4359588 Jakarta Utara
3.	K.H. Zubaidi Umar, S.H.	Ketua	Jl. Tawakal 11 No. 21 Tomang Jakarta Barat Telp. 56963927 - 56963358
4.	Ir. H.P. Sunaryo, M.Si.	Ketua	Meruya Ilir Blok H 8 No. B-9 Jakarta Barat Telp/Fax. 5851801
5.	H.M.Soehartono Rijadi, MBA.	Ketua	Perum Pemda Bakasi Jati Asih Blok A 7/3 Pondok Gede 17423 Telp. 8212631 - 8647619 - 8224823 Fax. 8215110
6.	H. Ahmad Kuntjoro, SE, MBA.	Ketua	Jl. Minas V Blok G 7 No. 3 Jati Waringin Asri Pondok Gede 17411, Telp. 8460752 HP. 0816-829287
7.	Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.	Ketua	Perum Pondok Cikinir Indah Jl. Garuda II No. 1 Jati Bening Bekasi Telp. (021) 8477022, HP. 0811- 871326
8.	Ir. H. Zainal Asyikin Abbas	Ketua	Jl. Bonjol No. 7 Jakasetia Bekasi Selatan, Telp. (021) 8227982 HP. 0811-199250
9.	Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc.	Ketua	Jl. Kalasan No. 4 C Cikini Jak-Pus Telp. (021) 3904331 Fax. 3810081 HP. 0816- 887170

12.	Ust. H. Bambang Sukamto, BE, MM	Wk. Sek Jen	Jl. Asih Permai III No.1 Perum Pemda Bekasi Jati Asih Blok C 7 Pondok Gede 17423 Telp. (021) 8213877 - 8648503
13.	Drs. H. Elmursil, Ak.	Bendahara	Jl. H. Ja'ani 49 Kebon Jeruk Jakarta 11530 Telp. (021) 5331966 HP. 0816-1942728
14.	H. Abu Bakar Sidiq, BSc.	Wk. Bendahara	Jl. H. Ja'ani No. 35 Kebon Jeruk Jakarta 11530 Telp. (021) 5300276
15.	H. Deddy Soepriadi, Ak, MM.	Wk. Bendahara	Jl. Cempaka Warna No. 6 Rt.012/04 Cempaka Putih Jakarta 10510, Telp. 4250014 HP. 0816-876790

3.	Sumatera Barat	Ir. Zulfikri Sofran Z, SE.	Jl. Tenggiri No. 10 Ulak Karang Padang, Telp. (0751) 54567-55727
4.	Riau	Annis Muali, SE, M.Si. Ir. Purnomo	Jl. Harapan Raya No. 239 Pekan Baru Telp.(0761)26383/ 44321
5.	Jambi	Drs. Nurhamid Hadi	Jl. Kol Pol. M. Thaher Gg.Sringgit 2 Jambi, Telp (0741) 31706
6.	Sumatera Selatan	H.M. Yunus Ciknang, SE.	Jl. Bukit Kenten 8 Ilir Palembang Telp. (0717) 714361-410589
7.	Bengkulu	H. Nazarudin Sunan, ST.	Jl. Merapi XII No. 35 A Kebun Tebeng Bengkulu Telp. (0736) 26505-26647
8.	Lampung	Drs. Hermanto D.Kurniawan	Jl. Sutan Syahrir No. 21 Pahoman Bandar Lampung Telp. (0721) 705383-261159
9.	DKI Jakarta	Drs. H. Kais Ilyas Drs. H. Aceng Karimulloh	Jl. Tawakal XI No 18 Grogol Jakarta Barat Telp. (021) 5605951- 5682232
10.	Jawa Barat	Ir. H. Indarto Ir. H. Doddy Rohdiyat	Jl. Sekejati No.22 Bandung Telp. (022) 3033367

14.	Bali	Drs. Setyo Pranoto	Jl. Gunung Tangkuban Perahu Padang Cottage No. 24 Denpasar Telp. (0361)27185-237039
15.	NTB	Drs. Ir. Handoyo, M.Sc.	Jl. Meninting Raya No 56 Mataram 83127 Telp. (0370) 24724-24658
16.	NTT	Drs. H. Beni Purnomo Drs. Wahyu Winarto	Jl. H.R. Khoroh Sikumana Kotak Pos 128 Kupang Telp. (0391) 22998
17.	Kal. Bar.	Ir. M. Nurchosim	Jl. Wonosobo I. No.18 Pontianak Telp. (0561)38801
18.	Kal. Sel.	Drs. Rachmadi	Jl. Manggis Gg. Nangka No.6-8 Banjarmasin Telp. (0511)250272-256590
19.	Kal. Tim.	H.A. Rahman Ruyima, SE, MM. Ir. HKE. Waspodo	Jl. Pahlawan I No. 58 Samarinda Telp. (0541)62305-32456
20.	Kal. Teng.	Daliso Zakki Alfin	Jl. Lambung Mangkurat Gg. Swadaya Kotak Pos 133 Palangkaraya Telp. (0532)21338
21.	Sul. Sel.	Ir. Nengah Sutika, MS. Drs. Suyitno Widodo	Jl. Mawas Timur No. 5 Ujung Pandang Telp. (0411)457359-858941

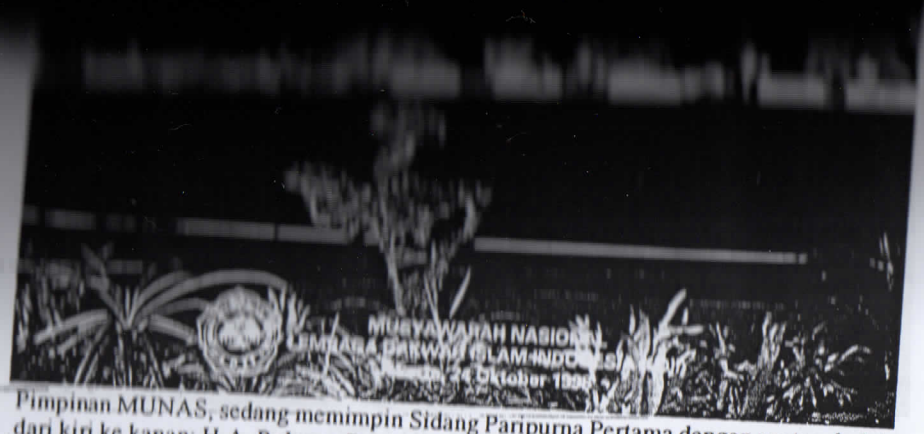
25.	Maluku	Slamet Riyadi, S.Sos	Jl. Hative Kecil No 313 Telp. (0911)56039-524333
26.	Irian Jaya	H. Mulyanto Diharjo M. Hasan, S.Pd.	Jl. Abe Pura No.18 PO. Box 516 Jayapura, Irian Jaya Telp. (0967) 34506 Fax. 71479
27.	Timor Timur	Ir. Abdullah Al Karim Sukamto	Komoro Dili Timor Timur Telp.(0390)24260



Bapak Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP Golkar sedang memberikan pengarahan dan pembekalan pada Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta 24 Oktober 1998



Bapak Rudini, sedang diwawancarai oleh Reporter TV RI dan wartawan Majalah Warta LDII, setelah selesai menyampaikan ceramah pengarahan, didampingi oleh Bapak Drs. H.A. Suarno, MBA. (Ketua Wanhat LDII), Bapak DR. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc. (Ketua Umum LDII terpilih).



Pimpinan MUNAS, sedang memimpin Sidang Paripurna Pertama dengan urutan duduk dari kiri ke kanan: H.A. Rahman Ruyima, SE. MM., (Kaltim), H.R. Sunaryo, SH. MM. (DPP), Ir. H. P. Sunaryo, MSi, (DPP), Ir. H. Abusyaifan A.J. Karim, MSc. (DPP), R.H. Sanusi K. Rasidi, SH. (Wanbin), H. Selamat, SH. (Sumut), Ir. H. Indarto (Jabar), Ir. H. Nengah Sutika, MSc. (Sulsel).



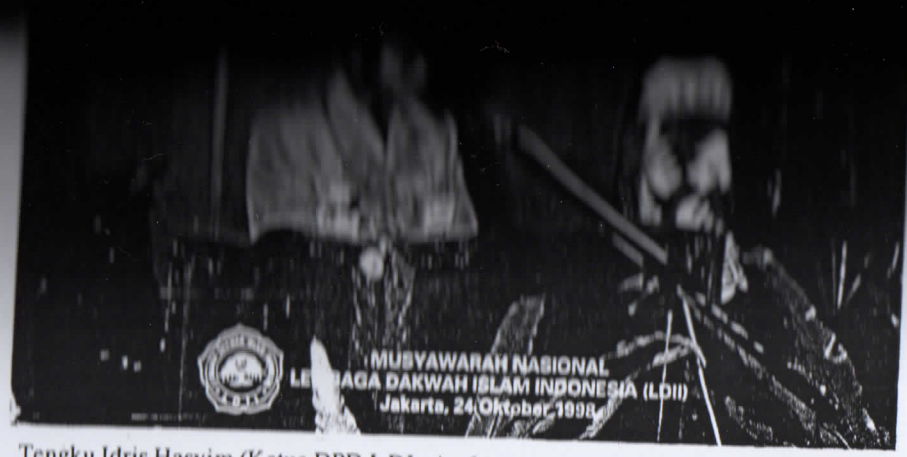
Suasana pemilihan Ketua dan Sekjen yang dilaksanakan secara Demokratis dan jurdil oleh Pimpinan MUNAS V serta dipandu oleh Bapak H. Sanusi Kurnaen R., SH., disaksikan oleh pejabat Dep. Dalam Negri. (Nomor dua dari kiri)



Ketua Umum LDII Periode 1990-1992 Bapak H. Hartono Slamet sedang menyampaikan pidato pertanggungjawaban pada sidang MUNAS V LDII, 24 Desember 1998 di Jakarta.



Ketua Umum LDII Periode 1998 - 2004, Bapak Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc., sedang menyampaikan sambutan pertamanya pada sidang MUNAS V LDII seusai pemilihan Ketua Umum dan Sekjen.



Tengku Idris Hasyim (Ketua DPD I DI. Aceh), sedang menyampaikan laporan daerah, usul dan saran dalam pandangan umum Sidang Paripurna MUNAS V LDII. (Jakarta, 24 Oktober 1998)



H. Mulyanto Diharjo (Ketua DPD I Prop. Irian Jaya), sedang menyampaikan laporan daerah, usul saran, dalam pandangan umum Sidang Paripurna MUNAS V LDII (Jakarta, 24 Oktober 1998).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 1981.

MUSYAWARAH BESAR KE II LEMKARI

PIMPINAN

Ketua,

(Ir. ABDULLAH SYAM)

Sekretaris,

(M. NOER ALI)